

INDIKATOR MAKRO

KOTA BANJARBARU Tahun 2017



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru**

bekerja sama dengan



**Badan Pusat Statistik
Kota Banjarbaru**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. P. SURIANSYAH NO. 5 BANJARBARU Telp. (0511) 6749076

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya publikasi **“Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2017”** yang disusun sebagai hasil kerjasama oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru dengan BPS Kota Banjarbaru.

Publikasi Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2017 menggambarkan kondisi perekonomian Kota Banjarbaru selama tahun 2016. Kondisi ekonomi makro Kota Banjarbaru, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, perkembangan harga-harga, keuangan, moneter dan investasi Kota Banjarbaru tersaji dalam publikasi ini.

Harapan saya, terbitnya publikasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penentuan skala prioritas pembangunan khususnya di wilayah Kota Banjarbaru.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan meridhoi segala usaha dan pengabdian kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarbaru, Oktober 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kota Banjarbaru

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penulisan	3
1.2 Metodologi	3
1.3 Sistematika Penulisan	4
II. GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU	8
III. PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA BANJARBARU	16
3.1 Jumlah, Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk	16
3.2 Kepadatan Penduduk	21
3.3 Komposisi Penduduk	23
IV. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU	28
V. PERKEMBANGAN STATISTIK HARGA	38
5.1 Indeks Harga Konsumen (IHK)	38
5.2 Inflasi	43
5.3 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	57
4.2.1 Indeks Harga Konsumen (IHK)	46
4.2.2 Laju Inflasi	50
VI. TABUNGAN DAN INVESTASI	61
6.1 Penghimpunan Dana	63
6.2 Penyaluran Kredit	62
6.3 Penanaman Modal	69
VII. KETIMPANGAN PENDAPATAN	75
7.1 Teori Ketimpangan Pendapatan	78
7.2 Mengukur Ketimpangan Melalui Kurva Lorenz dan Gini Ratio	81



7.3 Menghitung Ketimpangan Pendapatan Kota Banjarbaru	83
7.4 Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan.....	89
VIII PERKEMBANGAN KEMISKINAN	93
8.1 Kemiskinan	95
8.1.1 Garis Kemiskinan	97
8.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	98
IX ANGKATAN KERJA	105
9.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	107
9.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja	110
9.3 Daya Serap Tenaga Kerja	112
9.4 Produktivitas Tenaga Kerja	113
X INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	116
7.1 Angka Harapan Hidup(AHH)	122
7.2 EYS dan MYS	123
7.3 PPP	126
LAMPIRAN	131



PENDAHULUAN

1



1

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya oleh pemerintah dan masyarakat serta pembentukan pola kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam proses pembangunan daerah sering muncul masalah baik dalam pelaksanaan maupun masalah yang mendasar. Salah satu masalah dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk penduduk, pemerintah dan masyarakat harus aktif bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Ada berbagai macam teori pembangunan ekonomi daerah yang jika diintegrasikan secara komprehensif dapat membantu dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, dalam menganalisis perekonomian daerah terdapat beberapa kendala berkaitan dengan ketersediaan data seperti keterbatasan data, ketidaksamaan data dan kesulitan pengumpulan data. Terkait dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menguraikan beberapa indikator-indikator dan variable-variabel makro



yang menggambarkan keadaan kinerja pembangunan di Kota Banjarbaru Tahun 2016.

1.1. Maksud dan Tujuan Penulisan

Penulisan publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator makro Kota Banjarbaru selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Bagi pemerintah daerah, publikasi ini dapat digunakan sebagai *kompas* untuk melihat sektor-sektor yang perlu mendapat perhatian lebih agar kinerjanya terus dapat ditingkatkan. Sedangkan bagi masyarakat lainnya publikasi ini dapat digunakan sebagai data untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan daerah Kota Banjarbaru. Penggambaran Kota Banjarbaru lewat indikator-indikator makro ini bertujuan menyediakan data untuk dapat menganalisis perekonomian regional Kota Banjarbaru.

1.2. Metodologi

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti disebutkan di atas, maka kegiatan penyusunan Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2016 ditempuh melalui pendekatan:

1. Studi kepustakaan, untuk memperoleh gambaran mengenai sistem ekonomi regional, perencanaan pembangunan regional, dan berbagai hal yang terkait dengan indikator makro.
2. Pengumpulan data-data dari berbagai sumber, untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang produksi, harga, nilai tambah bruto, data inflasi, data pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan



3. Melakukan analisis statistik deskriptif berdasarkan data-data kuantitatif, sehingga dapat dikaji secara lebih detail terhadap berbagai indikator Kota Banjarbaru.

1.3. Sistematika Penulisan

Indikator Makro Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II

Gambaran Umum Kota Banjarbaru

Menguraikan tentang Gambaran Umum Kota Banjarbaru Secara keseluruhan

BAB III

Perkembangan Penduduk Kota Banjarbaru

Menguraikan tentang perkembangan penduduk Kota Banjarbaru

BAB IV

Perkembangan Perekonomian Kota Banjarbaru

Menguraikan tentang Perekonomian Kota Banjarbaru secara garis besar dilihat dari indikator perekonomian seperti Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita Penduduk .



BAB V

inflasi

Menguraikan tentang keadaan perkembangan harga komoditi barang dan jasa yang termasuk dalam komoditi penghitungan Inflasi yang dicerminkan oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Banjarmasin.

BAB VI

Tabungan dan Investasi

Menguraikan tentang Tabungan dan Investasi yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB VII

Ketimpangan Pendapatan

Menguraikan tentang kesejahteraan rakyat dilihat dari beberapa indikator; diantaranya tentang Distribusi Pendapatan yang dilihat dari angka Gini Ratio, Kriteria Bank Dunia dan Kurva Lorenz.

BAB VIII

Perkembangan Data Kemiskinan

Menguraikan tentang kesejahteraan rakyat dilihat dari beberapa indikator; diantaranya tentang kemiskinan yang dilihat dari Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

BAB IX

Perkembangan Ketenagakerjaan

Menguraikan tentang Angkatan kerja yang ada di kota Banjarbaru dilihat dari indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),



Daya Searp Tenaga Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran.

BAB X

Perkembangan IPM

Menguraikan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen-koponennya dengan metode baru penghitungan IPM.

BAB XI

Penutup yang akan memberikan kesimpulan atau agris besar dari uraian sebelumnya. Untuk melihat posisi Kota Banjarbaru di dari angka-angka PDRB dan turunannya dilakukan.



**GAMBARAN UMUM
KOTA
BANJARBARU**

2



2

GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU

2.1. Sejarah Kota Banjarbaru

Cikal bakal lahirnya Kota Banjarbaru merupakan gagasan dari Gubernur dr. Murdjani pada tahun 1951. Pada waktu itu, ketika dr. Murdjani memimpin apel di halaman gubernuran Banjarmasin, hujan turun dengan derasnya sehingga membuat halaman gubernuran “calap”. Oleh karenanya, dr. Murdjani memerintahkan untuk merancang Banjarbaru sebagai alternatif ibukota Kalimantan Selatan.

Sebelum berdiri sebagai sebuah kota tersendiri, sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1999, Banjarbaru merupakan kota administratif yang tergabung ke dalam Kabupaten Banjar.

Pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, Kota Banjarbaru resmi menjadi sebuah kota dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan SK Gubernur KDH Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei No 10/Pem-570-3-3 pada saat itu wilayah Banjarbaru hanya meliputi 7 desa. Dalam perjalanannya, wilayah Kota Banjarbaru mengalami perkembangan yaitu terdiri atas 3 kecamatan dengan 12 kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan Perda No 2 Tahun 2004 tanggal 26 Februari 2004 terbentuklah 5 kelurahan baru dan dengan Perda No 3 Tahun 2007



kembali dibentuk 3 kelurahan baru sehingga secara keseluruhan terdapat 20 kelurahan. Berikutnya dengan Perda No 4 Tahun 2007 wilayah Kota Banjarbaru terbagi menjadi 5 kecamatan.

Banjarbaru bukan merupakan ibukota provinsi, namun sebagian impian dr. Murdjani akan menjadi kenyataan seiring dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru yang sedang dirintis sejak tahun 2009.

2.2. Lambang Daerah dan Motto



❖ **Bentuk bingkai** seperti perisai menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur Bangsa Indonesia (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



- ❖ **Bintang bersudut lima** adalah Pancasila sebagai Dasar Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
- ❖ **Tulisan BANJARBARU** adalah nama Kota Administratif Banjarbaru (kini Kota Banjarbaru).
- ❖ **Petak/Kotak yang terdapat pada pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 11 buah.** Pilar dan petak menggambarkan tanggal dan bulan serta tahun berdirinya Kota Administratif Banjarbaru, yaitu tanggal 11 dan bulan November. Sedangkan jumlah petak pada pilar kiri dan kanan adalah 22 menggambarkan tahun berdirinya Kota Administratif Banjarbaru, yaitu 1975 ($1+9+7+5=22$).



- ❖ **Pilar kiri dan kanan** juga menggambarkan Banjarbaru sebagai jalur masuk (transportasi) ke Kalimantan Selatan. Sebagaimana terdapatnya Bandar Udara Syamsuddin Noor di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- ❖ **Alat Linggangan** adalah menggambarkan pendulangan Intan Tradisional Cempaka yang terdapat di Kecamatan Cempaka dan merupakan obyek wisata budaya, dan sejarah di Kota Administratif Banjarbaru.
- ❖ **Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat (sebagai obyek wisata, sejarah, dan budaya) yang diapit rumah** menggambarkan Kota Administratif Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Pemukiman.
- ❖ **Buku** adalah menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan, karena terdapatnya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari berbagai disiplin ilmu.
- ❖ **Roda (gir)** menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena di Kota Administratif Banjarbaru sangat potensial menjadi Daerah Industri dan Perdagangan.
- ❖ **Pita berwarna hijau yang bertuliskan motto Kota Administratif Banjarbaru** sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan, Pusat Industri, dan Pusat Pemukiman, merupakan daerah/wilayah yang Indah, Aman, dan Nyaman untuk mencapai kesejahteraan.

Warna yang digunakan, terdiri dari 5 (lima) warna utama:

- ❖ Warna kuning : Keluhuran, keagungan
- ❖ Warna putih : Kesucian
- ❖ Warna coklat : Keilmuan, keulamaan, keteguhan dan ketangguhan
- ❖ Warna hijau : Kesuburan, kehijauan, kerezekian
- ❖ Warna hitam : Kerohanian, keimanan, keteguhan hati.



Motto Gawi Sabarataan yang menjadi tulisan sarat makna pada lambang Kota Banjarbaru berarti:

- ❖ Ditinjau dari aspek kerukunan dan persatuan, gawi Sabarataan menggambarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama (Pemerintah dan masyarakat) dimana setiap unsur menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- ❖ Ditinjau dari aspek masa depan, Gawi Sabarataan secara operasional dapat memacu motivasi mencapai masa depan yang lebih baik.
- ❖ Ditinjau dari etos kerja, Gawi Sabarataan menjadi inspirasi masyarakat Banjarbaru untuk bekerja/berkarya sesuai dengan tugas pokok dan peran masing-masing.
- ❖ Pernyataan tekad dan semangat seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah untuk membangun dengan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera di bawah lindungan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa.
- ❖ Ditinjau dari segi ajaran agama manusia adalah pemegang amanat Tuhan sebagai penguasa yang harus memakmurkan bumi dan menjaga kelestariannya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

2.3. Visi dan Misi Kota Banjarbaru

Pada hakikatnya, visi kota mengadopsi dari visi walikota/wakil walikota terpilih, komitmen bersama merepresentasikan semua komponen masyarakat. Visi juga menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh aparatur pemerintah kota dan masyarakat di Kota Banjarbaru. Visi Kota Banjarbaru 2016-2021 adalah :



“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih. Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan



3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

2.4. Prioritas dan tujuan Pembangunan Kota Banjarbaru

Ada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 agar Pembangunan Kota Banjarbaru dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus yaitu :

1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang cerdas
3. Banjarbaru daerah tujuan investasi
4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

1. Meningkatkan derajat kesehatan
2. Meningkatkan Pelestarian Seni, Budaya dan Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
3. Meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan drainase
4. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni



5. Meningkatkan sarana prasarana dan sistem transportasi yang aman dan nyaman
6. Meningkatkan sarana prasarana Teknologi Informasi
7. Meningkatkan Kualitas Sanitasi, Air dan Udara
8. Meningkatkan kemandirian kota
9. Meningkatkan investasi
10. Meningkatkan sarana prasarana perekonomian
11. Meningkatkan kewirausahaan
12. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
13. Meningkatkan pelayanan publik
14. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
15. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
16. Meningkatkan budaya tertib
17. Meningkatkan perlindungan Sosial masyarakat
18. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif

2.5. Kondisi Wilayah Kota Banjarbaru

Secara geografi, Banjarbaru merupakan penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, di Martapura, yaitu dengan jarak 35 km dari Banjarmasin dan 2 km dari Martapura. Secara astronomi terletak pada $03^{\circ}25'40''$ - $03^{\circ}28'37''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}41'22''$ - $114^{\circ}54'25''$ Bujur Timur. Berada pada ketinggian 66 feet dpl, dengan wilayah relatif datar. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.



Dari sisi ketinggian Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0 - 500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m (33,49%), 7-25 m (48,46%), 25-100 m (15,15%), 100-250 m (2,55%) dan 250-500 m (0,35%).

Adapun kondisi fisik tanah yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi efektif per tumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase, keadaan erosi tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 87,78 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 8,09 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 0,38 persen wilayah. Sedangkan sisanya kelerengan >15 % mencakup 3,76 % luas wilayah.
- Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodik yaitu tergenang kurang dari 6 (enam) bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh.
- Berdasarkan Peta Kemampuan Tanah Skala 1 : 25.000, erosi tidak terjadi di wilayah Kota Banjarbaru

Berdasarkan peta Geologi, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang (Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap 3,47 persen. Berdasarkan peta skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3



(tiga) kelompok jenis tanah yaitu Podsolik (63,82%), Lithosol (6,36%) dan Organosol (29,82%).

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2016, suhu udara di Kota Banjarbaru berkisar antara 21,2°C sampai dengan 35,0°C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Agustus (35,0°C) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Agustus (21,2°C). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan berkisar antara 69,0% sampai 98,0%.

Selama 5 tahun terakhir, curah hujan pada tahun 2010 merupakan curah hujan tertinggi. Curah hujan kota Banjarbaru di tahun 2016 cukup ekstrim. Rata-rata curah hujan pada tahun 2016 tercatat 253,5 mm dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan Agustus (73 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan April (488 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 17,3 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember (26 hari), sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan Agustus (7 hari). Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru tahun 2016 berkisar antara 1.011,4 mb sampai dengan 1.013,6 mb sedangkan rata-rata kecepatan angin sekitar 3,9 knots.

2.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru, telah membagi rencana struktur ruang Kota Banjarbaru menjadi :

1. Pusat Pelayanan Kota meliputi :
 - PPK I : pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara.



- PPK II : pusat pelayanan ekonomi di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) adalah :
- Sub PPK I : Sub Pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka.
 - Sub PPK II : Sub Pusat Pelayanan Ekonomi di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin.
 - Sub PPK III : Sub Pusat Pelayanan Pemerintahan di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin.
3. Pusat Lingkungan (PL) terdiri atas kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintah, perdagangan dan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 5 kecamatan.



**PERKEMBANGAN
PENDUDUK KOTA
BANJARBARU**

3



3

PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA BANJARBARU

3.1 Jumlah, Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor strategis karena posisinya bukan hanya sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan, tetapi juga SDM akan berperan sebagai perencana dan pelaksana program-program pembangunan itu sendiri. Atas dasar pemikiran ini, pembangunan manusia harus dititikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang tentu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pemantauan perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi akan menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang.

Perkembangan jumlah penduduk dapat terjadi karena disebabkan oleh penambahan dan pengurangan jumlah penduduk akibat dari adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian adalah faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan yang non alami.



Berdasarkan data hasil sensus penduduk dan penghitungan angka proyeksi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 penduduk Kota Banjarbaru mencapai 201.222 jiwa, meningkat sebanyak 76.847 jiwa atau 61,78 persen dibanding tahun 2000 yang hanya 124.375 jiwa. Sedangkan berdasarkan penghitungan angka proyeksi periode tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2016 sebesar 241.369 jiwa.

Pada tahun 2016, jika dilihat menurut kecamatan, penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Landasan Ulin, yaitu sebanyak 62.247 jiwa, disusul Banjarbaru Utara 51.577 jiwa dan Banjarbaru Utara 51.294 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Cempaka dan Liang Anggang masing-masing hanya mencapai 33.921 jiwa dan 42.330 jiwa.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2012-2016
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Landasan Ulin	55.283	57.007	58.749	60.488	62.247
2	Liang Anggang	37.175	38.416	39.691	40.992	42.330
3	Cempaka	30.269	31.165	32.075	32.990	33.921
4	Banjarbaru Utara	45.829	47.235	48.664	50.108	51.577
5	Banjarbaru Selatan	45.455	46.872	48.321	49.793	51.294
Jumlah		214.011	220.695	227.500	234.371	241.369

Sumber : BPS Kota Banjarbaru



Selanjutnya bila dilihat berdasarkan laju pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir, maka angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru mencapai 3,07 persen per tahun, sedangkan pada periode tahun 2016 laju pertumbuhan penduduknya menjadi 2,99 persen pertahun.

Pada tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk periode tahun 2012-2016 sangat bervariasi dimana kecamatan yang relatif tinggi angka laju pertumbuhan penduduknya pada tahun 2016 adalah Kecamatan Liang Anggang dan Banjarbaru Selatan, masing-masing mencapai 3,26 persen dan 3,01 persen per tahun. Sedangkan kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya rendah adalah Cempaka hanya mencapai 2,82 persen.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru

No.	Kecamatan	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Landasan Ulin	3,17	3,12	3,06	2,96	2,91
2	Liang Anggang	3,32	3,34	3,32	3,28	3,26
3	Cempaka	2,97	2,96	2,92	2,85	2,82
4	Banjarbaru Utara	3,07	3,07	3,03	2,97	2,93
5	Banjarbaru Selatan	3,10	3,12	3,09	3,05	3,01
Banjarbaru		3,13	3,12	3,08	3,02	2,99

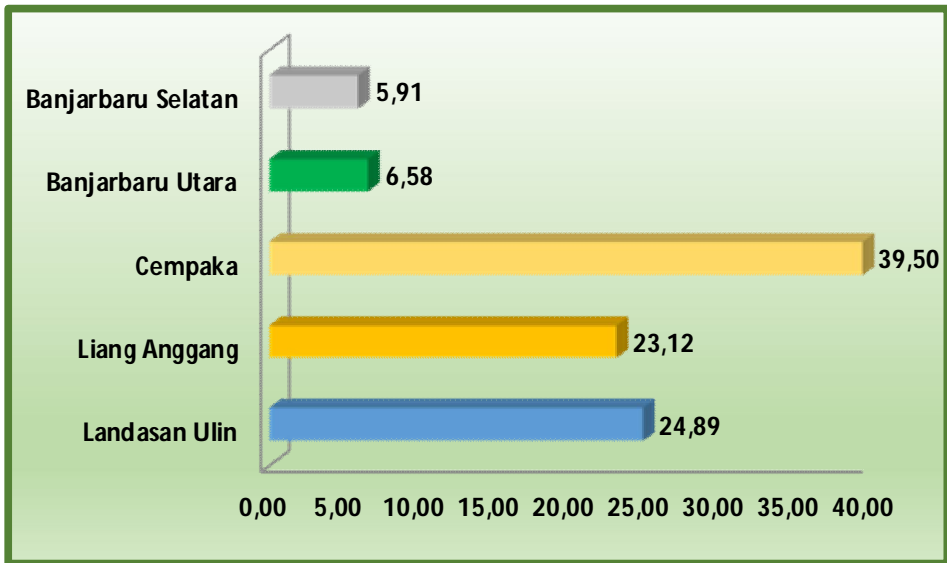
Sumber : BPS Kota Banjarbaru

3.2 Kepadatan Penduduk

Kota Banjarbaru memiliki luas sebesar 371,28 Km² atau 0,88 persen dari luas Provinsi Kalimantan selatan, Kota Banjarbaru berjarak 38 Km ke arah utara dari ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan dan mempunyai 5 kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan.



Grafik 3.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Banjarbaru (Persen)



Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Sebesar 39,50 persen porsi luas Kota Banjarbaru berada di kecamatan yaitu Cempaka dengan memberikan porsi terluas luas sebesar 146,70 Km² atau meliputi 39,50 persen dari total luas Kota Banjarbaru, diikuti Landasan Ulin dan Liang Anggang, masing-masing mencapai 92,42 Km² dan 85,86 Km². Sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu 21,96 Km² atau hanya meliputi 5,91 persen dari total luas Kota Banjarbaru.

Hubungan antara luas wilayah di suatu kota dengan jumlah penduduk dapat dilihat melalui kepadatan penduduk. Secara matematis kepadatan penduduk didapatkan melalui jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut. Kepadatan penduduk menggambarkan banyaknya penduduk (jiwa) yang berada pada suatu wilayah tiap satu km². Semakin tinggi kepadatan penduduk menunjukkan semakin padat/ banyak jiwa yang ada di

wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah kepadatan penduduknya menunjukkan semakin jarang penduduknya.

Adapun tingkat kepadatan penduduk di Kota Banjarbaru, sebagaimana yang nampak pada Tabel 3.3, pada tahun 2016 rata-rata mencapai 188 jiwa per Km², sedangkan di tingkat kecamatan yang paling tinggi ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan sebesar 2.336 jiwa per Km², disusul Banjarbaru Utara 2.110 jiwa. Adapun wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Cempaka yang mencapai 231 jiwa per Km².

Tabel 3.3 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Landasan Ulin	92,42	62.247	674
2	Liang Anggang	85,86	42.330	493
3	Cempaka	146,7	33.921	231
4	Banjarbaru Utara	24,44	51.577	2.110
5	Banjarbaru Selatan	21,96	51.294	2.336
Banjarbaru		371,38	241.369	650

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

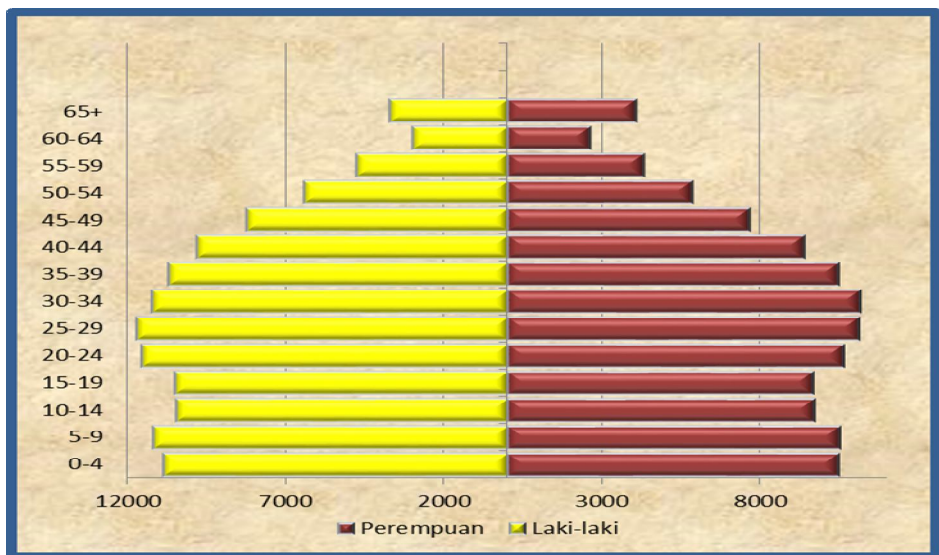
3.3 Komposisi Penduduk

Indikator kependudukan yang juga sangat penting untuk dicermati adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur. Komposisi atau struktur penduduk dapat dilihat dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya



memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-masalah ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu wilayah tertentu.

Grafik 3.2 Piramida Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2016



Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Komposisi penduduk Kota Banjarbaru didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Kelompok usia produktif (Kelompok usia 25-39) terlihat sangat mendominasi, dimana kelompok usia ini adalah mereka yang terlibat aktif dalam lapangan pekerjaan. Mereka pada umumnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi maupun sudah berumah tangga. Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dibidang kependudukan utamanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga diharapkan bisa menjadi penggerak roda perekonomian, bukan malah sebaliknya menjadi beban pembangunan.

**Tabel 3.4 Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)
Di Kota Banjarbaru Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Ketergantungan	43,58	43,02	45,04	44,88	41,61
Angka Ketergantungan Muda	39,50	38,81	40,69	40,33	37,02
Angka Ketergantungan Tua	4,08	4,21	4,35	4,55	4,58

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan penduduk Kota Banjarbaru sebesar 41,61 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 41 orang penduduk usia tidak produktif. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila penduduk yang berusia produktif tersebut juga sesungguhnya tidak produktif akibat menganggur meskipun kenyataannya mereka berada pada usia produktif. Berdasarkan hasil proyeksi SP2010, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2015 berbentuk piramida yang mengecil ke atas seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. Bila kita cermati lebih jauh antara penduduk laki-laki dan perempuan terjadi perbedaan jumlah penduduk pada usia nol sampai enam puluh empat tahun (0-64 tahun), dimana pada usia ini didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh, namun dapat memberikan gambaran bahwa pada kelompok



usia ini laki-laki lebih mampu mempertahankan kehidupannya. Penduduk perempuan mendominasi pada kelompok usia 65 tahun ke atas.

Penduduk menurut kelompok usia diatas dapat disederhanakan lagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0 – 14 tahun), usia produktif (15 – 64 tahun) dan usia tua (65+ lebih) dapat diketahui bahwa populasi Kota Banjarbaru pada tahun 2016 didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak 70,62 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk usia produktif laki-laki (70,80 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (70,43 persen). Sedangkan yang tergolong usia muda tahun 2016 mencapai 26,15 persen dan usia tua sekitar 3,24 persen.

Tabel 3.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Kota Banjarbaru Tahun 2016

Kelompok Usia (tahun)	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Muda (0 – 14)	32.460	26,20	30.648	26,09	63.108	26,15
Usia Produktif (15-64)	87.709	70,80	82.740	70,43	170.449	70,62
Usia Tua (65 +)	3.720	3,00	4.092	3,48	7.812	3,24
Jumlah	123.889	100,00	117.480	100,00	241.369	100,00

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Secara keseluruhan, struktur penduduk Kota Banjarbaru yang didominasi oleh penduduk usia produktif mampu menyediakan sumber tenaga kerja yang besar yang diperlukan dalam kegiatan perekonomian, namun disisi lain apabila penduduk usia produktif ini tidak dapat terserap di pasar tenaga kerja dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk.



**PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN
KOTA
BANJARBARU**

4



4

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU

Visi Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah Mandiri dan Terdepan Dalam Pelayanan. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kota Banjarbaru yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Banjarbaru yang terdepan karena pelayanan aparatur publiknya dalam pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi (jasa, industri dan perdagangan), pelayanan pemukiman dan pelayanan pemerintahan. Dengan terdepannya Banjarbaru dalam pelayanan publiknya, maka diharapkan akan dapat menimbulkan multi effect bagi pembangunan daerah, terutama dari sisi ekonomi.

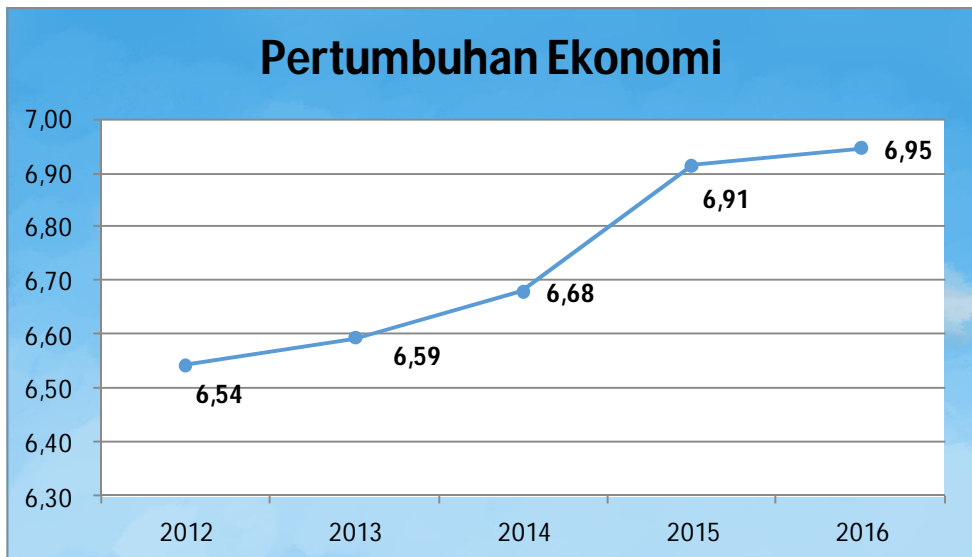
Pembangunan kota Banjarbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir dilihat dari sisi ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan rata-rata pertumbuhan diatas 5 persen dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Melihat perkembangan perekonomian yang selalu meningkat tersebut maka rasa optimis untuk mewujudkan visi tersebut di atas menjadi semakin kuat, apalagi untuk mewujudkan visi tersebut di atas, pemerintah daerah Kota Banjarbaru telah menetapkan misi pembangunan yaitu : “MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”, dimana diharapkan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan maka nantinya Kota Banjarbaru akan mempunyai daya saing yang tinggi di antara kabupaten kota



lainnya di Kalimantan Selatan. Daya saing yang tinggi akan dapat membawa masyarakatnya kedalam taraf hidup yang lebih sejahtera.

Grafik 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2012-2016

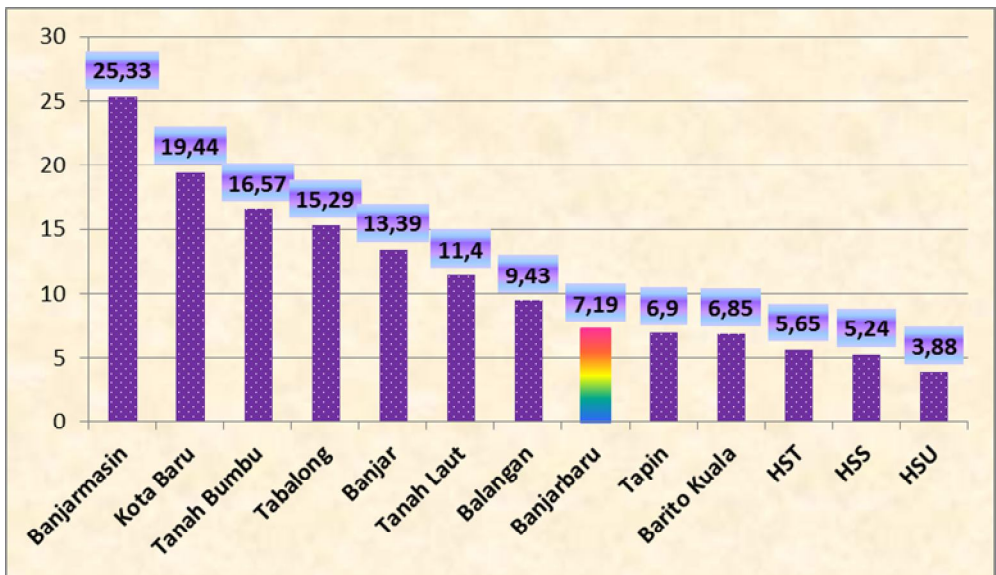


Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011- 2015

Kinerja perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan berbeda sesuai dengan potensi sumber daya yang ada diwilayah tersebut. Dari beberapa faktor produksi yang tersedia, luas wilayah dan ketersediaan sumber daya alam (SDA) menjadi faktor kunci dari kemampuan penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu kabupaten/kota yang memiliki potens tersebut akan mampu menghasilkan PDRB yang relative besar. Pada tahun 2016, besaran nominal PDRB Kota Banjarbaru sebesar 7,19 triliun rupiah berada di urutan kedelapan setelah Banjarmasin, Kotabaru, Tanah Bumbu

Tabalong, Banjar, Tanah Laut dan Balangan. Adapun nilai PDRB terkecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Grafik 4.2. Nominal PDRB Harga Berlaku Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan, Tahun 2016 (Triliun Rupiah)



Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011- 2015

Besaran angka PDRB atas dasar harga berlaku Kota Banjarbaru setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 besaran PDRB atas dasar harga berlaku kota Banjarbaru hanya sebesar 4,3 triliun rupiah tetapi kemudian seiring dengan pesatnya pembangunan di Kota Banjarbaru selama kurun waktu lima tahun terakhir ini, maka nilai PDRB terus meningkat hingga mencapai 7,19 triliun rupiah di tahun 2016.

Peningkatan nilai nominal ini membuat angka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan Kota Banjarbaru selalu meningkat setiap tahunnya, dari 6,54 di tahun 2012 hingga mencapai 6,95 persen di tahun 2016.

Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2012- 2016 (Ribu Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Pertumbuhan Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	4.366.554	3.924.617	6,54
2013	4.943.727	4.183.368	6,59
2014	5.641.964	4.462.827	6,68
2015 ^{*)}	6.507.731	4.771.383	6,91
2016 ^{**)}	7.194.398	5.102.802	6,95

Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011- 2015

^{*)}Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selain dilihat dari angka pertumbuhannya, perekonomian suatu daerah juga dapat dilihat berdasarkan struktur ekonominya. Struktur perekonomian dapat dilihat berdasarkan distribusi persentase PDRB. Dengan memperhatikan besaran angka persentase distribusi maka dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang sangat berperan dalam pembentukan perekonomian wilayah.

PDRB tahun 2015 dilakukan berdasarkan penghitungan PDRB tahun dasar 2010, dimana pembagian ekonomi tidak lagi didasarkan atas 9 sektor perekonomian tetapi perekonomian didasarkan atas tujuh belas kategori seperti yang ditampilkan pada tabel 3.2.

Dari 17 Kategori pembentuk perekonomian suatu daerah, ada 4 kategori yang dominan dalam terhadap total PDRB ADHB Kota Banjarbaru yaitu : Kategori Transportasi dan Pergudangan; Kategori Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan keamanan; Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Kategori Konstruksi. Iniatinya perekonomian Kota Banjarbaru lebih didukung oleh empat kategori tersebut. Keempat kategori ini



memberikan share di atas 10 persen, sedangkan kategori lainnya hanya memberikan share berkisar antara 0,21 sampai dengan 9,23 persen.

Tabel 4.2. Distribusi PDRB Kota Banjarbaru Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (persen)

Kat	Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SEKTOR PRIMER		6,85	6,54	6,35	6,18	5,96
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,36	2,28	2,22	2,13	2,10
B	Pertambangan dan Penggalian	4,49	4,25	4,13	4,05	3,86
SEKTOR SEKUNDER		54,17	55,21	55,42	55,49	55,82
C	Industri Pengolahan	8,73	8,24	7,98	7,71	7,73
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,12	0,14	0,19	0,21
E	Pengadaan Air	0,62	0,59	0,60	0,59	0,58
F	Konstruksi	14,54	14,24	14,51	14,71	14,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,56	10,44	10,44	10,40	10,62
H	Transportasi dan Pergudangan	19,59	21,59	21,76	21,90	22,02
SEKTOR TERSIER		38,98	38,25	38,23	38,33	38,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	2,63	2,69	2,60	2,58
J	Informasi dan Komunikasi	5,12	4,79	4,83	4,63	4,63
K	Jasa Keuangan	1,76	1,83	1,81	1,75	1,78
L	Real Estate	2,30	2,23	2,26	2,17	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,97	13,08	12,96	13,31	12,59
P	Jasa Pendidikan	8,90	8,64	8,54	8,71	9,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,00	2,98	3,01	3,04	3,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,74	1,63	1,68	1,69	1,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*)Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Menurut aktivitasnya sektor perekonomian dibagi atas tiga kelompok sektor, yaitu Sektor Primer; Sektor Sekunder dan Sektor Tersier, pembagian kelompok ini berdasarkan dari sumber daya yang digunakan dalam memproduksi suatu barang yang dihasilkan.

Jika dikelompokkan dalam tiga kelompok sektor ini, maka Kota Banjarbaru lebih ditunjang oleh sektor Sekunder dengan share sebesar 55,82 persen . Sektor ini adalah sektor-sektor (kategori) yang memproduksi, dan menciptakan produk akhir yang siap konsumsi. Termasuk didalamnya adalah kategori Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, kategori pengadaan Air, kategori konstruksi, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Transportasi dan Pergudangan

Kelompok Sektor penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian adalah kelompok sektor Tersier dengan share sebesar 38,22 persen. Berbeda dengan sektor primer, dan sektor sekunder yang menciptakan produk berbentuk, maka sektor tersier adalah sektor jasa yang menciptakan produk tak berbentuk berupa layanan kepada konsumennya. Ada Sembilan kategori yang termasuk dalam kelompok ini seperti dapat dilihat pada table 3.2., dimana diantara Sembilan kategori tersebut ada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang telah mengambil peran tiga besar dalam perekonomian.

Kelompok sektor terkecil dalam sumbangannya terhadap perekonomian adalah sektor Primer yang hanya mampu berperan sebesar 5,96 persen. Kelompok Sektor ini adalah sektor-sektor yang memanfaatkan langsung sumber dari daya alam, termasuk di dalamnya pertanian, perhutanan, perikanan, dan pertambangan. Di Negara-negara berkembang biasanya sektor ini merupakan sektor utama, dan berkontribusi paling besar, namun di Kota Banjarbaru



kelompok sektor ini perannya sangat kecil karena Banjarbaru tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang dapat dikembangkan sebagai penunjang dalam kelompok sektor ini.

Jika kelompok sektor ini dibandingkan per kurun waktu tertentu, maka dapat dilihat pergeseran struktur ekonomi (*shifting share*). Pada table 3.2. dapat dilihat bahwa peranan sektor Primer semakin menurun perannya, digantikan oleh kelompok sektor lainnya yang semakin meningkat. Pergeseran sektor kearah kelompok Tersier dan Sekunder ini menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru semakin berkembang sebagaimana ciri dari daerah berkembang lainnya yang lebih mengandalkan kedua sektor tersebut.

Dibandingkan dengan struktur perekonomian kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan maka struktur perekonomian Kota Banjarbaru berbeda dengan kabupaten lainnya, dimana sampai dengan tahun 2016 struktur perekonomian Kota Banjarbaru didominasi oleh peranan kategori tersier dan kategori sekunder, ini karena Kota Banjarbaru merupakan wilayah perkotaan yang didominasi oleh wilayah permukiman dan perkantoran dan tidak memiliki SDA yang berlimpah. Sementara di kabupaten lainnya pada umumnya lebih dominan pada kelompok sektor primer karena Sumber Daya Alam yang melimpah di daerahnya.

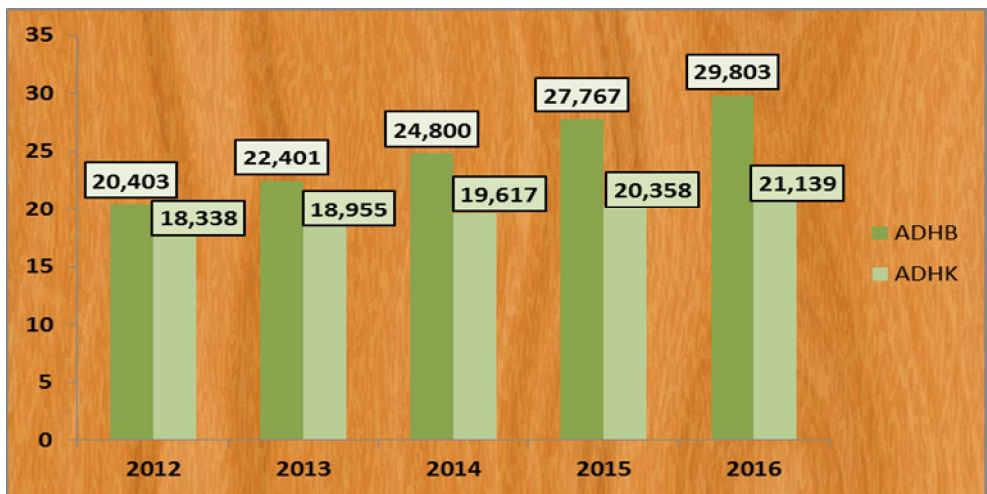
Besaran PDRB yang dihasilkan oleh daerah jika dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan nilai PDRB perkapita. Nilai ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Dikatakan bahwa semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin sejahtera penduduknya.

Menurut klasifikasi world bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.045 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$1.045 - \$4.125



termasuk negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.746 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Grafik 4.3. PDRB Per Kapita Kota Banjarbaru Tahun 2012-2016



Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016

Selama kurun tahun 2012-2016 PDRB perkapita Kota Banjarbaru semakin meningkat setiap tahunnya dari 20,403 juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 29,803 juta rupiah pada tahun 2016, atau tumbuh rata-rata 10,35 persen setiap tahunnya. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita kota Banjarbaru masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*).

Meskipun PDRB per kapita penduduk semakin meningkat, bukan berarti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk juga meningkat. Dalam penghitungan PDRB per kapita adhb masih terdapat pengaruh inflasi, sehingga untuk melihat

peningkatan kesejahteraan penduduk secara riil maka kemampuan daya beli juga perlu dilihat atau dibandingkan perkembangannya.

Perkembangan kemampuan daya beli secara kasar dapat digambarkan dengan perkembangan angka pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Angka ini walau tumbuh meningkat selama periode 2012-2016, dari 3,31 persen pada tahun 2012 menjadi 3,83 persen pada tahun 2016, tetapi perkembangannya masih di bawah peningkatan pertumbuhan PDRB atas Dasar harga Berlaku. Ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Banjarbaru masih berada pada posisi yang belum cukup untuk dikatakan sebagai penduduk dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Hal ini sesuai dengan kriteria bank dunia yang hanya menempatkan Kota Banjarbaru sebagai kelompok daerah berpendapatan menengah bawah.



PERKEMBANGAN HARGA

5



5

PERKEMBANGAN Statistik Harga

Harga merupakan faktor yang dominan dalam keberhasilan pembangunan. Kestabilan harga kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier menjadi dambaan masyarakat umum. Penyebab dari perkembangan harga adalah tingkat persediaan suatu komoditi dan faktor permintaan. Jika persediaan komoditi melimpah, misalnya pada musim panen, maka harga komoditi tersebut cenderung akan menurun. Sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu komoditi menjadi sangat tinggi maka harga akan cenderung naik dan bisa jadi tidak terkontrol. Biasanya keadaan ini akan berlangsung bersamaan dengan momen-momen tertentu berkaitan dengan perayaan hari besar agama dan tahun baru.

Kondisi politik dan keamanan global maupun regional secara langsung juga berpengaruh terhadap perubahan harga yang berdampak pada perekonomian secara umum.

5.1 Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK merupakan indeks yang digunakan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menghitung laju inflasi Indonesia. IHK dianggap sebagai alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang reliable dan tepat waktu. BPS mengelompokkan barang konsumsi dan jasa untuk penghitungan IHK menjadi 7 (tujuh) kelompok (berdasarkan *the Classification*



of individual consumption by purpose - COICOP), yakni : kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta kelompok transportasi dan komunikasi.

Perubahan harga dalam penghitungan IHK tersebut adalah perubahan harga komoditi pada tahun berlaku dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Mulai Januari 2014 rilis inflasi menggunakan IHK tahun dasar 2012 jika dibandingkan IHK lama (2007=100). IHK 2012=100 banyak sekali perubahan khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya. Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota SBH lama dan 16 merupakan kota baru. Mencakup antara 225 s.d 462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Nilai IHK sama dengan 100 artinya harga komoditi pada tahun berlaku sama dengan harga tahun dasar. Nilai IHK kurang dari 100 artinya harga komoditi pada tahun berlaku lebih rendah dibandingkan harga komoditi yang sama pada tahun dasar dan sebaliknya.



Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode *point to point* untuk menghitung laju inflasi satu tahun. Sedangkan laju inflasi bulanan diperoleh dengan membandingkan IHK suatu bulan terhadap IHK bulan sebelumnya yang dinyatakan dalam persen. Secara sederhana, penghitungan inflasi tahunan dan bulanan oleh BPS (2012) adalah sebagai berikut:

- i. Inflasi Tahunan (*year on year*)

$$\pi_{it} = \frac{IHK_{it} - IHK_{i(t-1)}}{IHK_{i(t-1)}} \times 100$$

Di mana :

π_{it} = inflasi bulan i tahun t

IHK_{it} = Indeks Harga Konsumen bulan i tahun t

$IHK_{i(t-1)}$ = Indeks Harga Konsumen bulan i tahun t-1

- ii. Inflasi Bulanan (*month to month*)

$$\pi_i = \frac{IHK_i - IHK_{i-1}}{IHK_{i-1}} \times 100$$

Di mana :

π_{it} = inflasi bulan i

IHK_i = Indeks Harga Konsumen bulan i

IHK_{i-1} = Indeks Harga Konsumen bulan i-1 (bulan sebelumnya)

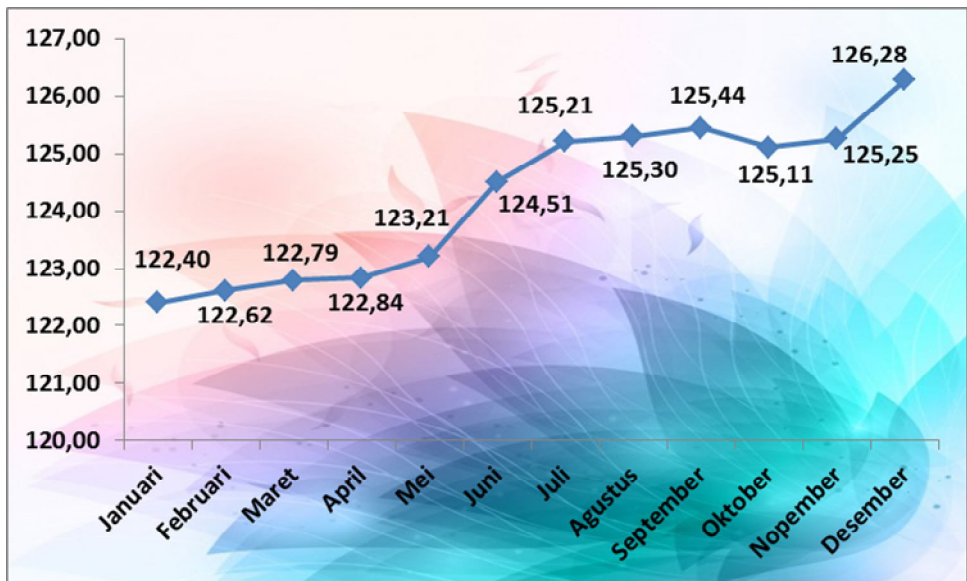
Jika hasil perhitungan di atas adalah bernilai positif maka disebut sebagai inflasi dan jika negatif disebut deflasi.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat perubahan harga dari berbagai komoditi (barang dan jasa) yang dibayar oleh konsumen. Sejak Tahun 2014 angka IHK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/Kota disekitarnya dapat mengacu pada kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kota Banjarbaru, yang lebih dekat dengan Kota Banjarmasin, maka



perkembangan inflasi di Kota Banjarbaru dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di kota Banjarbaru cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

Grafik 5.1. Perkembangan IHK Umum Kota Banjarmasin Tahun 2016 (Persen)



Sumber : Warta Inflasi 2016, BPS Provinsi Kalimantan Selatan

*) Dihitung dengan tahun dasar 2012 (2012=100)

Pada Tabel 5.1. terlihat secara umum harga barang dan jasa pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan harga-harga barang dan jasa pada tahun 2015. IHK umum pada Bulan Desember 2016 tercatat 126,28 atau mengalami kenaikan sekitar 3,68 persen dibandingkan harga pada bulan Desember 2015 (y-o-y). Kenaikan sebesar 3,68 persen tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya harga kelompok makanan jadi (7,23%), kelompok pakaian (4,49%), kelompok pendidikan (3,90%), kelompok transportasi & komunikasi (3,80%), kelompok kesehatan (3,64%), kelompok bahan makanan (2,07%), dan kelompok perumahan (0,75%).

Tabel 5.1. Indeks Harga Konsumen
Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2012-2016 (Persen)

Tahun/Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Pakaian	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi & Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
(2007=100)								
2012	173,5	154,01	135,96	147,74	124,73	124,64	109,26	143,47
2013	190,74	162,56	144,37	144,41	128,82	127,58	122,76	153,49
(2012=100)								
2014	124,25	118,59	110,83	101,21	115,22	107,86	119,26	115,97
2015	129,36	128,58	115,85	107,58	129,80	111,28	119,08	121,80
2016	132,04	137,87	116,72	112,41	134,52	115,62	123,6	126,28
Januari	131,73	129,79	116,95	108,97	130,41	112,51	115,47	122,40
Februari	130,96	130,76	116,16	109,47	130,77	112,68	117,02	122,62
Maret	130,38	131,74	115,67	110,05	131,05	112,97	117,58	122,79
April	130,03	133,09	115,25	110,67	131,38	113,11	116,51	122,84
Mei	130,06	134,04	115,19	111,48	131,93	112,9	117,04	123,21
Juni	130,6	136	115,3	112,42	131,95	112,73	120,96	124,51
Juli	132,67	136,52	115,49	113,42	132,64	112,61	121,25	125,21
Agustus	131,83	136,49	115,8	113,61	133,18	114,54	121,43	125,3
September	130,75	137,28	115,82	113,88	133,3	115,11	122,01	125,44
Oktober	128,23	137,72	116,1	113	133,45	114,95	122,34	125,11
November	128,35	137,66	116,48	113,11	134,04	115,01	122,34	125,25
Desember	132,04	137,87	116,72	112,41	134,52	115,62	123,6	126,28

Sumber : Warta Inflasi 2016, BPS Provinsi Kalimantan Selatan

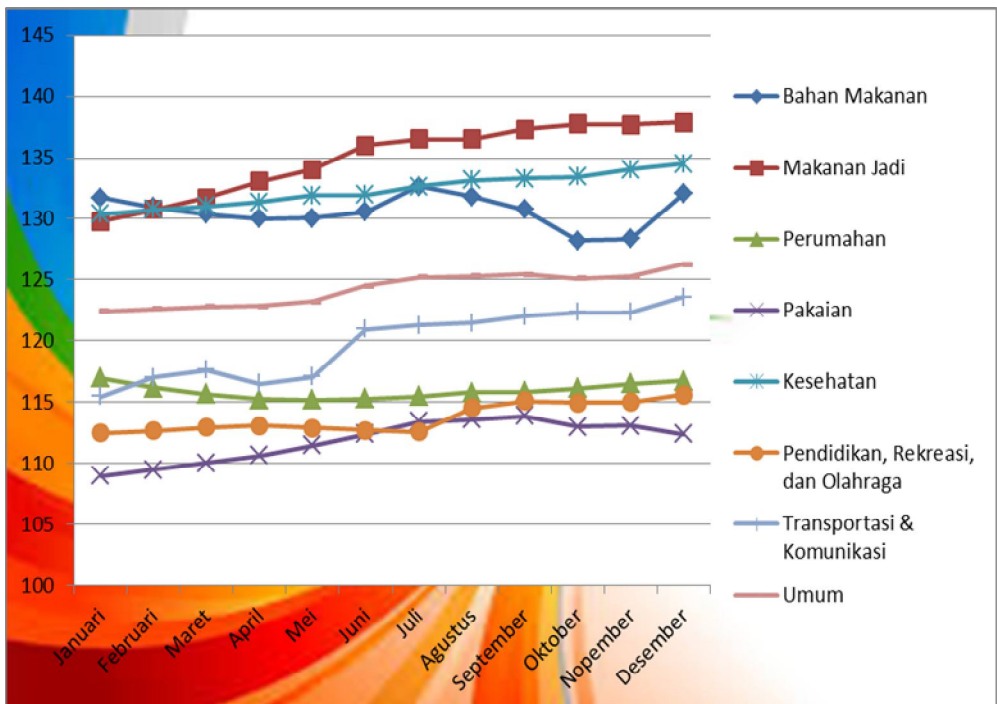
*) Dihitung dengan tahun dasar 2012 (2012=100)

Dengan tahun dasar 2012 adalah seratus, maka terlihat bahwa pergerakan harga sudah semakin meningkat di setiap kelompok komoditi, di tahun 2015 pergerakan tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan hingga mencapai indeks 129,80 tapi kemudian di tahun 2016, kelompok makanan jadi menjadi yang tertinggi dengan indeks 137,87. Kelompok perumahan pergerakan harganya relatif



lambat, hanya 115,85 di tahun 2015 dan 116,72 di tahun 2016. Pergerakan harga antar komoditi selama tahun 2016 di rinci per bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.2.
Perkembangan IHK Tahun 2016 Kota Banjarmasin Per Komoditi (Persen)



Sumber : Warta Inflasi 2016, BPS Provinsi Kalimantan Selatan

*) Dihitung dengan tahun dasar 2012 (2012=100)

5.2 Inflasi

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum di konsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap bahkan tak jarang ada juga yang harganya justru turun. Resultante (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan

jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru dan manipulasi yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan Inflasi, sedangkan penurunannya di sebut deflasi.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk :

- a. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (wage-indexation)



- b. Penyesuaian nilai kontrak (contractual payment)
- c. Eskalasi nilai proyek (Project escalation)
- d. Penentuan target inflasi (inflation targeting)
- e. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (budget indexation)
- f. Sebagai pembagi PDB, PDRB (GDP inflation)
- g. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (proxy of cost of living)
- h. Indikator dini tingkat bunga valas dan indeks, harga saham

Mengingat arti penting inflasi tersebut maka dalam publikasi ini, disediakan ruang tersendiri guna menggambarkan dinamika inflasi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Inflasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu daerah. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi.

Jenis dan Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Berdasarkan tingkat keparahannya inflasi dibedakan menjadi :

1. Inflasi Ringan, yaitu tingkat inflasi sampai dengan 10% atau 20% setahun;
2. Inflasi Sedang, yaitu antara 10% s/d 30% setahun;
3. Inflasi Berat, yaitu antara 30% s/d 100% setahun;
4. Hiper Inflasi, yaitu di atas 100% setahun.

Inflasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pergerakan harga komoditas. Pengelompokan ini berdasarkan faktor-faktor penyebab inflasi yaitu faktor fundamental ekonomi yang berdampak pada munculnya tekanan inflasi yang bersifat permanen atau faktor non fundamental yang berdampak pada munculnya tekanan inflasi yang bersifat sementara. Menurut BPS (2006) inflasi dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Inflasi inti (*core inflation*) adalah inflasi komoditas yang perkembangan



harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat permanen/menetap.

2. *Inflasi volatile food* adalah inflasi kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Sebagai contoh, inflasi yang terjadi pada beberapa komoditas bahan makanan seperti beras, cabai, dan beberapa jenis sayuran lainnya seringkali berfluktuasi secara tajam karena dipengaruhi oleh kondisi kecukupan pasokan komoditas yang bersangkutan (faktor musim panen, gangguan distribusi, bencana alam, dan hama).
3. *Inflasi administered price* adalah inflasi kelompok komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah. Sebagai contoh, perubahan harga yang terjadi pada BBM, tarif listrik, telepon, angkutan dalam kota, dan air minum yang selama ini dipengaruhi oleh pemerintah atau instansi pemerintah. Termasuk perkembangan harga rokok juga mengikuti perubahan harga jual eceran rokok yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua (Samuelson dan Nordhaus, 1998:587) yaitu:

1. *Demand Inflation*, yaitu inflasi yang timbul karena desakan permintaan masyarakat akan barang dan jasa begitu kuat. Inflasi ini muncul karena naiknya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat cenderung membeli barang dan jasa lebih banyak dari yang biasa mereka gunakan. Misalnya seseorang yang biasa mengonsumsi susu satu gelas sehari, karena pendapatnya meningkat, maka konsumsi susunya juga meningkat menjadi 3



gelas sehari. Dengan meningkatnya konsumsi atau pembelian, akan mendorong naiknya harga barang-barang.

2. *Cost* atau *Cost-push Inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi. Misalnya terjadi kenaikan bahan bakar atau tuntutan buruh akan kenaikan upah, dimana kedua hal itu merupakan bagian dari biaya produksi, maka perusahaan pun akan menaikkan harga jual barang dan jasanya.

Berdasarkan asal-usul terjadinya, inflasi dibedakan menjadi:

1. *Domestic inflation*, yaitu inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri. Misalnya pemerintah mengalami defisit anggaran belanja kemudian pemerintah mencetak uang baru, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Keadaan ini akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat, bila penawaran barang tetap, maka hal ini akan mendorong kenaikan harga barang-barang.
2. *Imported inflation*, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebagai contoh adalah negara kita, dimana negara kita masih banyak mengimpor bahan baku dan barang modal lainnya. Apabila harga barang-barang yang diimpor itu naik, maka biaya produksi juga meningkat, yang akhirnya akan menaikkan harga jual barang dan jasa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi disuatu daerah. Dari sudut pandang ekonomi, pada prinsipnya inflasi itu terjadi karena tidak adanya keserasian antara laju pertumbuhan uang dan tingkat pertumbuhan barang dan jasa. Apabila jumlah uang beredar meningkat, sedangkan produksi barang dan jasa tetap, maka hal ini cenderung akan mendorong terjadinya inflasi. Namun demikian, dari uraian tentang jenis-jenis inflasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi, yaitu antara lain :

1. Naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa



Ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), biasanya diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Bila kenaikan besarnya permintaan ini tidak diimbangi dengan penambahan volume barang dan jasa di pasar, maka hal ini akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan gaji PNS ini pada dasarnya mengindikasikan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar. Jenis inflasi ini disebut demand-pull inflation.

2. Kenaikan biaya produksi

Pada waktu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka harga barang-barang di pasar juga akan meningkat. Mengapa? Karena kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi, akibatnya perusahaan juga menaikkan harga jual barang dan jasanya. Disini terjadi cost-push inflation.

3. Defisit anggaran belanja (APBN)

Defisit APBN yang ditutup dengan percetakan uang baru oleh Bank Indonesia, akan berakibat pada bertambahnya jumlah uang beredar, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.

4. Menurunnya nilai tukar rupiah

Menurunnya nilai tukar terhadap valuta asing, seperti US dollar, Yen, Deutsche Mark, akan berdampak pada semakin mahalnya barang-barang produksi impor. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi.

Faktor uang dan barang/jasa seperti diuraikan diatas memang berdampak langsung terhadap inflasi. Bila ditelusuri, maka sumber penyebab inflasi dapat juga berasal faktor-faktor sosial dan politik. Sebagai contoh, adanya berbagai kerusuhan sosial seperti yang terjadi akhir-akhir ini, juga memberikan dorongan terhadap laju inflasi. Berbagai kerusuhan sosial yang terjadi menyebabkan rasa tidak aman pada penduduk, sehingga mendorong mereka untuk membeli barang-barang dalam jumlah besar dari kebutuhan.



Untuk mengetahui sumber pemicu inflasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa seperti tingkat produksi, distribusi dan *stock*. Produksi yang berlebihan dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang di pasar (*excess supply*) dan harga turun atau inflasi rendah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari-hari raya/lebaran dan tahun ajaran baru.
3. Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang dan jasa.

Untuk mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut niscaya tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit dikendalikan.

Agar inflasi tidak semakin buruk, perlu adanya upaya untuk menekan inflasi, diantaranya:

1. Menjaga keserasian antara laju penambahan uang beredar dengan laju pertumbuhan barang dan jasa. Penambahan jumlah uang beredar harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pertumbuhan penawaran barang dan jasa. Di samping itu, jumlah uang beredar senantiasa harus dipantau dan dikendalikan. Beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah (Bank Indonesia guna mengendalikan jumlah uang beredar

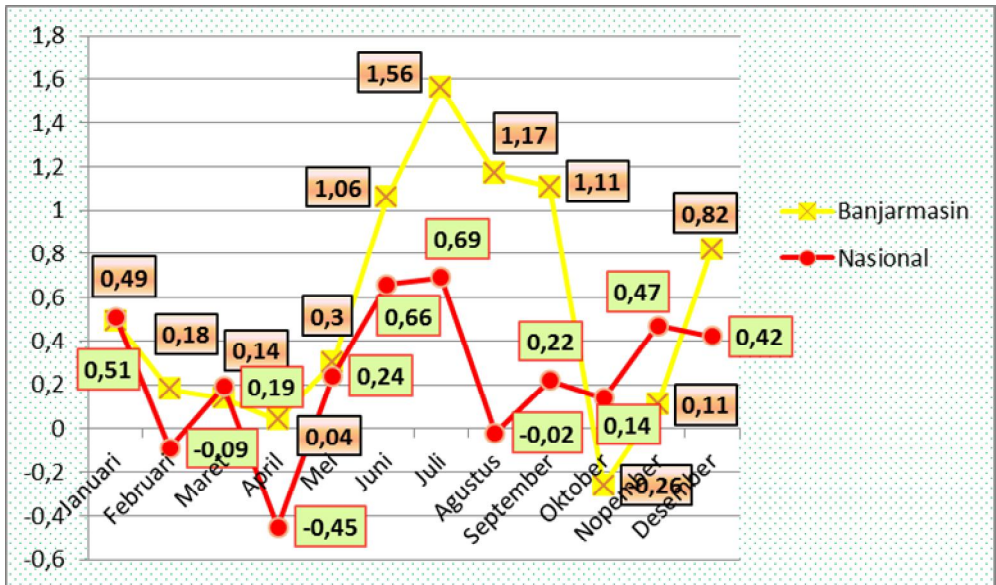


- adalah: Politik operasi pasar terbuka (Open Market Operation);
2. Politik diskonto dan bunga pinjaman; serta Politik mengubah cadangan minimal bank-bank umum pada Bank Indonesia. Selain itu perlu dilakukan pengawasan pinjaman secara selektif maupun Pembujukan moral (moral suation).
 3. Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Nilai tukar rupiah yang cenderung merosot terhadap mata uang asing, akan mendorong laju inflasi. Mengapa? Sebab negara kita masih banyak mengimpor barang-barang modal dan juga bahan baku produksi. Jika mata uang rupiah merosot, maka harga barang-barang impor untuk kebutuhan produksi menjadi lebih mahal. Hal ini berarti akan menaikkan biaya produksi, yang selanjutnya akan menaikkan harga barang dan jasa di pasar.
 4. Melakukan intervensi pasar. Pada masa-masa tertentu dapat terjadi lonjakan terhadap permintaan barang-barang dipasar, seperti menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus, karena dapat menyulut kenaikan harga barang-barang pada umumnya. Kenaikan harga barang-barang secara temporer memang tidak dapat disebut inflasi.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2016, secara umum di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 3,68 persen. Dengan kata lain secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 3,68 persen pada akhir tahun 2016 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2015.



**Grafik 5.3. Inflasi Bulanan Kota Banjarmasin dan Indonesia
Tahun 2016 (Persen)**



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan

Gerakan inflasi bulanan, banyak dipengaruhi oleh momen perayaan hari besar agama, kondisi transportasi serta musim. Momen perayaan hari besar agama dan tahun baru merupakan momen yang merubah komposisi permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasaran. Umumnya pada momen tersebut permintaan terhadap makanan baik bahan makanan maupun makanan jadi dan permintaan sandang, serta transportasi bertambah tinggi. Untuk faktor musim, biasanya berpengaruh pada harga barang-barang bahan makanan produk pertanian terutama padi dan palawija, sedangkan faktor kondisi transportasi akan mempengaruhi kesinambungan barang-barang yang didatangkan dari luar pulau. Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu mencapai 1,06 persen. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Oktober (-0,26 persen).

**Tabel 5.2. Laju Inflasi Kota Banjarmasin
menurut Kelompok Komoditi Tahun 2012 - 2016**

Tahun /Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Pakaian	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi & Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
2012	8,83	7,85	5,71	3,91	4,12	2,88	0,5	5,96
2013	9,94	5,55	6,19	-2,25	3,28	2,36	12,36	6,98
2014	10,13	8,65	5,15	-0,42	9,76	4,09	7,52	7,16
2015	4,11	8,42	4,53	6,29	12,65	3,17	-0,15	5,03
2016	2,07	7,23	0,75	4,49	3,64	3,90	3,80	3,68
Jan	1,83	0,94	0,95	1,29	0,47	1,11	-3,03	0,49
Feb	-0,58	0,75	-0,68	0,46	0,28	0,15	1,34	0,18
Maret	-0,44	0,75	-0,42	0,53	0,21	0,26	0,48	0,14
April	-0,27	1,02	-0,36	0,56	0,25	0,12	-0,91	0,04
Mei	0,02	0,71	-0,05	0,73	0,42	-0,19	0,45	0,30
Juni	0,42	1,46	0,1	0,84	0,02	-0,15	3,35	1,06
Juli	1,58	0,38	0,16	0,89	0,52	-0,11	0,24	0,56
Agust	-0,63	-0,02	0,27	0,17	0,41	1,71	0,15	0,07
Sept	-0,82	0,58	0,02	0,24	0,09	0,5	0,483	0,11
Okto	-1,93	0,32	0,24	-0,77	0,111	-0,14	0,27	-0,26
Nop	0,09	-0,04	0,33	0,1	0,44	0,05	0	0,11
Des	2,87	0,15	0,21	-0,62	0,36	0,53	1,03	0,82

Sumber : Warta Inflasi 2012 - 2016, BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi tahun kalender terbesar terjadi pada kelompok makanan jadi yaitu sebesar 7,23 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender terkecil terjadi pada kelompok perumahan sebesar 0,75 persen. Jika dilihat andil inflasinya, secara kumulatif dari bulan januari sampai dengan bulan desember 2016, maka sumbangan terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 3,68 persen. Sedangkan yang



memberikan sumbangan terkecil terhadap inflasi disumbangkan oleh kelompok pakaian dengan andil sebesar 0,16 persen.

Tabel 5.3. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kota Banjarmasin Bulan Januari - Desember 2016

No.	Kelompok	Andil Bulan Desember	Andil Bulan Jan-Des
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bahan Makanan	0,82	3,68
2	Makanan Jadi	0,56	0,42
3	Perumahan	0,04	1,79
4	Pakaian	0,04	0,16
5	Kesehatan	-0,04	0,28
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,02	0,20
7	Transportasi & Komunikasi	0,03	0,22
8	Umum	0,17	0,61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Perbedaan yang terjadi antara andil inflasi bulan Desember dan tahun (2016) ini menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu harga suatu kelompok komoditi mungkin saja akan naik/turun, hal ini karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pasar, dimana untuk bulan Desember adalah bulan vakansi atau liburan serta adanya perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga banyak penduduk yang melakukan perjalanan baik untuk liburan tahun baru maupun untuk melakukan perayaan Natal di kampung halaman, sehingga harga tiket angkutan baik darat, laut maupun udara bergerak naik sesuai permintaan bahkan kadang mencapai limit tertinggi batas atas harga yang ditetapkan, demikian juga dengan harga kue basah sehingga inilah yang mendorong terjadinya inflasi pada kelompok ini dengan andil tertinggi di bulan Desember 2016. Tetapi kemudian setelah keadaan permintaan menjadi normal kembali



maka harga tiket angkutan juga akan turun bahkan bisa mencapai limit batas bawah, sehingga akan mendorong terjadinya deflasi. Gejala yang besar pada turunnya harga inilah yang pada akhirnya secara kumulatif andil deflasi kelompok ini menjadi yang terbesar selama tahun 2016 dibanding kelompok lainnya yang gejala harganya tidak terlalu signifikan. Hal ini juga dicerminkan oleh table 4.4. berikut, khususnya pada angkutan Udara.

Tabel 5.4. Lima Pendorong Inflasi Utama Kota Banjarmasin Selama Tahun 2016

No	Komoditas	Persentase Perubahan Harga	Andil dalam Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angkutan Udara	43,41	0,83
2	Kue Basah	62,49	0,42
3	Nasi dengan Lauk	11,20	0,34
4	Bawang Merah	51,79	0,18
5	Rokok Kretek Filter	7,34	0,18

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari lima komoditas yang memberikan pengaruh terbesar dalam mendorong infasi selama tahun 2016, maka Angkutan Udara menjadi faktor utama pendorong inflasi dengan persentase perubahan harga dibanding tahun sebelumnya sebesar 43,41 persen, dengan andil inflasi sebesar 0,83 persen.

Kelima faktor pendorong ini jika dimasukkan dalam kelompok komoditi maka hanya komoditas dari kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan yang menjadi faktor utama pendorong inflasi seperti angkutan udara komoditas dari kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan, bawang merah komoditas dari kelompok bahan makanan, dan kue basah, nasi dengan lauk serta rokok kretek



filter komoditas dari kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok. Sementara itu komoditas dalam 4 (empat) kelompok komoditi lainnya tidak ada yang menjadi faktor utama pendorong inflasi

Kebalikan dari faktor pendorong adalah faktor penahan inflasi, faktor-faktor inilah yang mampu menahan inflasi jangan sampai melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Tabel 4.5. berikut dapat menjelaskan kelima faktor penahan inflasi tersebut.

Hampir semua komoditas penahan inflasi berasal dari kelompok Bahan Makanan yaitu daging ayam ras, beras, dan ikan papuyu. Sementara hanya dua komoditas yang bukan dari kelompok Bahan Makanan yaitu bensin dan kayu balokan. Komoditas ini merupakan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar.

Tabel 5.5. Lima Penahan Inflasi Utama Kota Banjarmasin Selama Tahun 2016

No	Komoditas	Persentase Perubahan Harga	Andil dalam Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bensin	-11,30	-0,37
2	Kayu Balokan	-11,46	-0,10
3	Daging Ayam Ras	-4,72	-0,07
4	Beras	-1,43	-0,06
5	I kan Papuyu	-19,98	-0,05

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Kelompok yang paling begejolak umumnya adalah kelompok Bahan Makanan. Oleh karena itu pengelompokan terhadap barang dan jasa ini selain dikelompokkan dalam 7 kelompok komoditi ada pula pengelompokkan berdasarkan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk



menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6. Laju inflasi Kota Banjarmasin Menurut Komponen

Komponen	IHK Des 2016	Inflasi Bulan Des 2016	Inflasi Tahun Kalender	Andil Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	126,28	0,82	3,68	0,82
Diatur Pemerintah	140,25	0,71	4,70	0,12
Bergejolak (Volatile)	131,64	3,37	2,21	0,57
Inti (Core)	121,97	0,22	3,82	0,13

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Ada 18 komoditas yang termasuk dalam komponen barang dan jasa yang diatur pemerintah disebut juga *administrative prices* yaitu ; Rokok kretek, rokok filter, rokok putih, tarif air minum (PDAM), tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, tarip puskesmas, angkutan antar kota dan dalam kota, angkutan laut, angkutan udara, bensin, solar, tarip taxi, tarip telepon, tarip pembuatan SIM, tarip parkir, dan biaya perpanjangan STNK, dimana komponen ini dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll. Inflasi pada kelompok ini di tahun 2016 paling tinggi yaitu 4,70 persen walaupun andil inflasinya merupakan yang terendah yaitu hanya sebesar 0,12 persen.

Komponen Bergejolak (Volatile) sebanyak 58 komoditas; kelompok ini berisikan komponen yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga



komoditas pangan internasional. Inflasi pada kelompok ini sebesar 2,21 persen dengan andil inflasi sebesar 0,57 persen.

Komponen Inti merupakan yang terbanyak yaitu 300 komoditas; kelompok ini adalah kelompok yang pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti permintaan dan penawaran, ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen, serta lingkungan eksternal lainnya. Inflasi pada kelompok ini merupakan yang terbesar kedua yaitu 3,82 persen dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen.

Dengan perkembangan harga di setiap komponen pembentuk inflasi ini serta memperhatikan faktor pendorong dan faktor penahan di setiap bulannya maka pemerintah dapat melakukan upaya atau langkah yang nyata dalam menjaga kestabilan harga, sehingga inflasi dapat terjaga sesuai yang ditargetkan pemerintah.

5.3 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua



metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output.

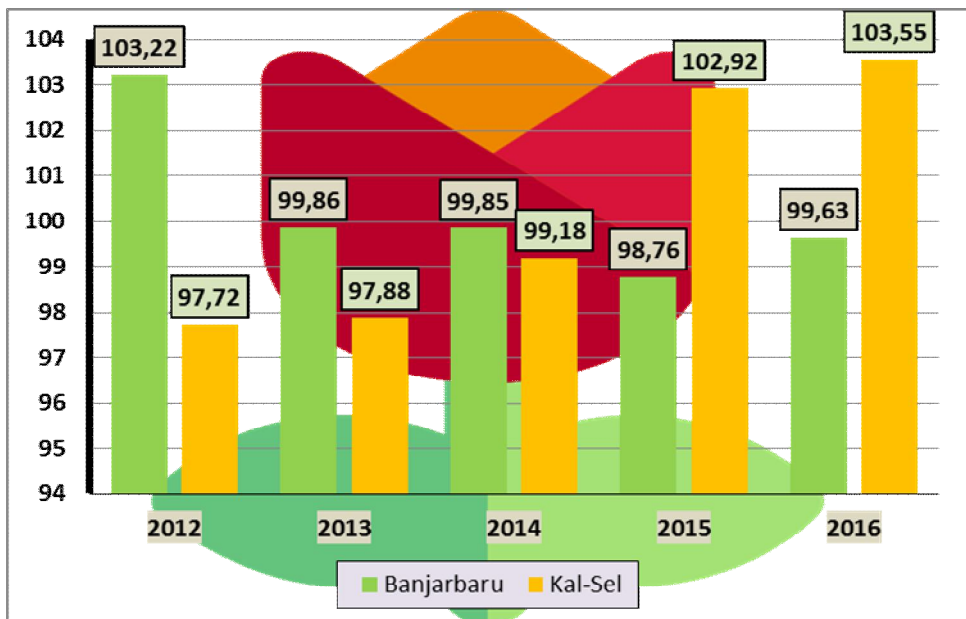
Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*.

Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor.

Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.



Grafik 5.4. Perkembangan IKK Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Banjarbaru dari tahun 2012 hingga tahun 2016 secara keseluruhan terus menurun, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,8 persen. Pada tahun 2016, IKK Kota Banjarbaru adalah 99,63 artinya secara geografis pembangunan konstruksi di Kota banjarbaru 0,37 persen lebih murah dibanding kota acuan IKK Tahun 2016, yaitu Kota Surabaya.

**TABUNGAN
DAN
INVESTASI**



6

TABUNGAN DAN INVESTASI

Pertumbuhan ekonomi di suatu Negara bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bagi Negara-negara maju, mereka bisa mengandalkan hasil produksi barang dan jasa walau tidak menutup kemungkinan pula adanya pinjaman yang mereka lakukan serta adanya investasi. Tapi bagi Negara-negara yang sedang berkembang tentu tidak mudah jika hanya mengandalkan faktor produksi barang dan jasa saja, maka ada faktor lain yang menentukan seperti halnya pinjaman dan investasi.

Menurut Sadono Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara/daerah. Dan penghitungan pendapatan daerah dengan metode pengeluaran, salah satu komponennya adalah pengeluaran investasi.

Investasi menurut beberapa tokoh ekonomi seperti Unariyah adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Menurut Boediono, investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan untuk perluasan pabrik. Sehingga disimpulkan bahwa investasi itu adalah sebuah



keputusan untuk menunda konsumsi demi meningkatkan kemampuan sumber daya.

Ada tiga jenis pengeluaran investasi yaitu investasi tetap bisnis ; mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi, Investasi Residential yaitu investasi yang mencakup rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal atau disewakan, dan Investasi persediaan yaitu mencakup barang-barang perusahaan yang disimpan digudang. Bentuk investasi bermacam-macam seperti berbentuk tabungan, emas, saham dan obligasi serta lainnya.

Mengikuti kerangka berpikir dari model Harrod – Domar, di dalam suatu ekonomi tertutup (tanpa sektor luar negeri) dalam kondisi *full employment*, dan tanpa mobilitas capital, tabungan (S) menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, mekanismenya melalui pertumbuhan investasi (I). Oleh karena itu investasi dapat dikatakan sebagai fungsi dari tabungan $I = f(S)$. Semakin tinggi tingkat tabungan yang dapat diciptakan maka semakin besar kemampuan Negara untuk melakukan investasi. Selanjutnya, peningkatan investasi menambah lebih banyak lagi capital dan lewat proses multiplier menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Dengan rasio S/Y tetap tidak berubah.

Dalam kaitannya dengan tabungan dan investasi, lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan mempunyai peran yang besar dalam menunjang kegiatan ekonomi tersebut. Peranan ini tidak lepas dari sistem ekonomi yang menempatkan perbankan dan lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari pihak ketiga. Penghimpunan dana dari masyarakat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan khususnya yang berasal dari dalam negeri dan menjadi stimulus pergerakan ekonomi masyarakat. Disamping menghimpun dana, perbankan juga harus menyalurkan dana yang



berupa kredit baik kredit konsumsi, modal kerja maupun kredit investasi. Pemberian kredit ini selain mendorong berkembangnya kegiatan usaha juga meningkatkan permintaan produk barang dan jasa di masyarakat. Penyaluran kredit juga merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja perbankan.

6.1. Penghimpunan Dana

Tabel 6.1. Penghimpunan Dana Perbankan Menurut Jenisnya di Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2016 (Jutaan Rupiah)

Tahun *)	Jenis Penghimpunan			
	Giro	Deposito	Tabungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	495.410	358.827	1.659.922	2.514.159
2105	628.416	398.249	1.951.349	2.978.014
2016	421.955	668.486	2.056.056	3.146.497
Januari	574.577	400.411	1.921.180	2.896.168
Februari	629.925	398.489	1.842.855	2.871.269
Maret	650.151	409.082	1.827.499	2.886.732
April	667.743	445.937	1.749.902	2.863.582
Mei	653.141	446.365	1.714.916	2.814.422
Juni	613.043	452.253	1.845.949	2.911.245
Juli	619.021	509.105	1.777.868	2.905.995
Agustus	581.561	503.143	1.776.345	2.861.049
September	550.643	573.463	1.845.492	2.969.598
Oktober	584.347	502.525	1.829.647	2.916.519
Nopember	527.161	572.694	1.895.075	2.994.930
Desember	421.955	668.486	2.056.056	3.146.497

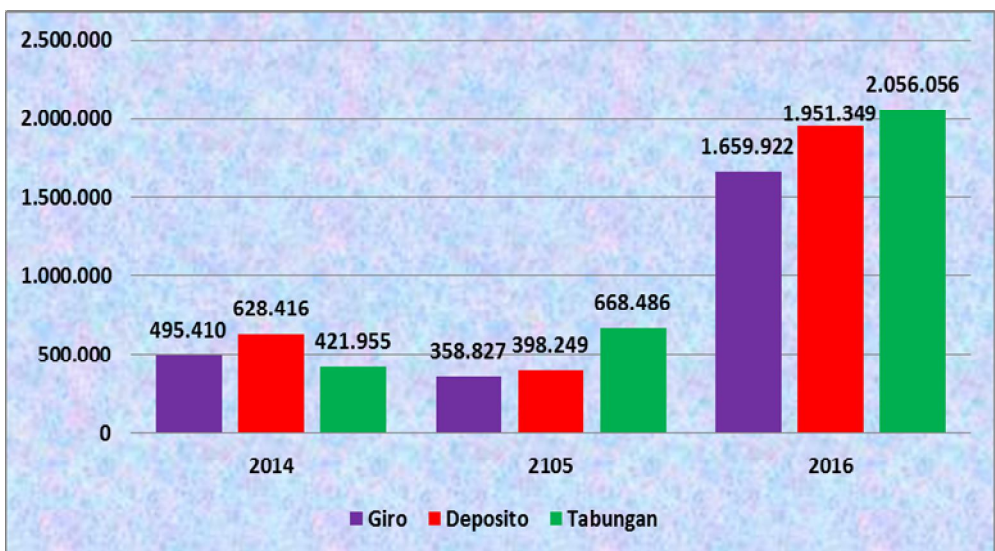
Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia

*) Posisi Bulan Desember



Seiring dengan membaiknya kinerja perbankan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan semakin banyaknya produk perbankan yang ditawarkan, mendorong peningkatan penghimpunan dana khususnya yang berasal dari dalam negeri. Dalam menjalankan operasional kegiatan perbankan, Bank memiliki tiga sumber dana yaitu ; (1) dana yang bersumber dari masyarakat, (2) dana yang bersumber dari bank itu sendiri, (3) dana yang bersumber dari lembaga lain. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat berupa giro, deposito dan tabungan.

Grafik 6.1. Penghimpunan Dana Perbankan di Kota Banjarbaru Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)



Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia

Penghimpunan dana yang dilakukan perbankan di Kota Banjarbaru sampai akhir tahun 2016 mencapai 3,15 triliun rupiah atau meningkat sebesar 5,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,98 triliun rupiah. Dari seluruh dana yang berhasil dihimpun tersebut, yang terbesar berasal dari

tabungan yaitu sebesar 2,06 triliun rupiah atau 65,34 persen dari total dana. Sementara itu, jenis simpanan deposito merupakan yang terkecil dari total dana yang dihimpun dari masyarakat, yaitu sebesar 668,49 milyar rupiah atau sebesar 21,24 persen dari keseluruhan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Tingginya minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada jenis simpanan tabungan nampaknya disebabkan oleh kemudahan persyaratan untuk menabung dan pencairan uang yang disimpan.

6.2. Penyaluran Kredit

Selain sebagai penghimpun dana, bank juga berfungsi sebagai penyalur kredit terhadap masyarakat. Fungsi intermediasi bank akan berjalan dengan baik jika kemampuan menghimpun dana dan penyaluran kredit berjalan seirama. Oleh karena itu, bank berusaha untuk menawarkan berbagai macam kredit dan beragam keuntungan. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank.

Penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan, dan ini merupakan pendapatan terbesar dari setiap bank. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Namun demikian, pelaku perbankan juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tersebut untuk menghindarkan kredit macet (*non performing loan*). Hal ini disebabkan pemberian kredit disamping dapat meningkatkan kinerja perbankan, juga dapat meningkatkan resiko yang harus ditanggung oleh perbankan.



**Tabel 6.2. Penyaluran Kredit Menurut Jenis Penggunaan
di Kota Banjarbaru Tahun 2014-2016 (Jutaan Rupiah)**

Tahun *)	Jenis Penggunaan Kredit			
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	908.858	679.347	2.201.113	3.789.318
2015	874.585	649.075	2.533.742	4.057.402
2016	864.373	834.153	2.751.613	4.450.138
Januari	876.587	645.554	2.548.149	4.070.290
Februari	871.727	642.230	2.574.355	4.088.312
Maret	894.283	649.090	2.599.742	4.143.115
April	2.622.527	657.070	839.475	4.119.071
Mei	2.639.906	651.186	868.223	4.159.315
Juni	2.666.953	667.782	886.572	4.221.488
Juli	2.672.160	665.765	878.172	4.216.097
Agustus	2.525.071	645.443	798.262	3.968.777
September	2.704.292	844.810	882.558	4.431.660
Oktober	2.714.816	853.697	868.244	4.436.757
Nopember	2.739.767	844.939	857.758	4.442.284
Desember	2.751.613	834.153	864.373	4.450.138

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
Bank Indonesia

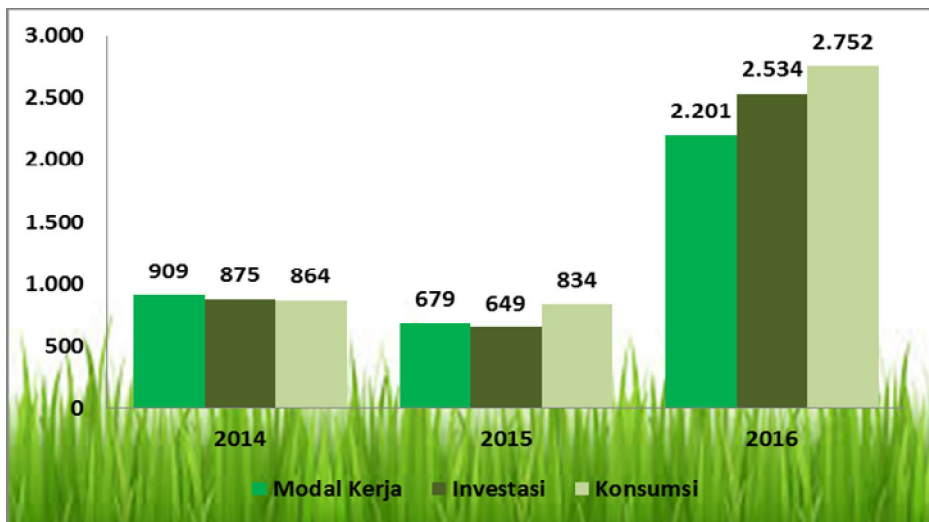
*) Posisi Bulan Desember

Secara umum jumlah penyaluran kredit pada posisi bulan Desember tahun 2016 di Kota Banjarbaru adalah sebesar 4,45 triliun rupiah atau meningkat sebesar 9,68 persen dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 4,06 triliun rupiah. Dari total penyaluran kredit tahun 2016 sekitar 61,83 persen (2,75 triliun rupiah) digunakan untuk konsumsi dengan pertumbuhan sebesar 8,60 persen. Besarnya proporsi kredit untuk konsumsi sebenarnya kurang menggembirakan bagi dunia usaha. Hal ini mengindikasikan masyarakat lebih cenderung menggunakan uangnya untuk hal-hal yang kurang produktif dan bukan menggunakan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan penghasilan



keluarga. Dengan kata lain dapat dikatakan adanya kecenderungan untuk berlaku konsumtif.

Grafik 6.2. Penyaluran Kredit Menurut Sektor di Kota Banjarbaru Tahun 2016 (milyar Rupiah)



Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia

Kredit untuk modal kerja pada tahun 2016 sebesar 19,42 persen dari total penyaluran kredit (864,37 milyar rupiah). Kondisi ini sesuai dengan komitmen perbankan untuk turut menunjang kegiatan usaha. Sedangkan penyaluran kredit untuk investasi sekitar 18,74 persen dari total penyaluran kredit (834,15 milyar rupiah).

Bila dilihat menurut sektor ekonomi, sebagian besar sektor mengalami penurunan dalam hal penyerapan kredit, kecuali sektor pertanian mengalami kenaikan yaitu dari 248,78 miliar rupiah pada tahun 2015 naik menjadi 445,48 miliar rupiah tahun berikutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 531,99 milyar rupiah menjadi 577,26 miliar rupiah serta pengangkutan dan komunikasi yang naik dari 75,04 miliar rupiah menjadi 93,79 miliar rupiah.

Penurunan penyerapan kredit untuk sebagian sektor tersebut salah satunya juga disebabkan oleh imbas perlambatan perekonomian di Kalimantan Selatan yang turut menekan daya beli masyarakat.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya jenis kegiatan yang tercakup dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan penyerap kredit terbesar yaitu sebesar 577,26 miliar rupiah atau 33,36 persen dari total seluruh kredit yang disalurkan perbankan di Kota Banjarbaru. Sektor jasa-jasa yang merupakan sektor andalan dalam perekonomian Banjarbaru pada tahun ini menyerap 104.06 miliar rupiah atau 6,01 persen dari total kredit yang disalurkan.

**Tabel 6.3. Penyaluran Kredit Menurut Sektor
di Kota Banjarbaru Tahun 2014-2016 (Jutaan Rupiah)**

Sektor	Penyaluran Kredit ^{*)}		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan	194.240	248.775	445.482
Pertambangan dan Penggalian	50.394	33.525	26.718
Industri Pengolahan	120.198	127.900	125.108
Listrik, Gas, dan Air Bersih	3.677	2.010	1.337
Konstruksi	290.828	306.385	270.019
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	584.100	531.991	577.261
Pengangkutan dan Komunikasi	85.919	75.045	93.789
Kuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	130.610	115.216	86.412
Jasa-jasa	128.242	115.208	104.060
Jumlah	1.588.206	1.556.055	1.730.186

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
Bank Indonesia

*) Posisi pada bulan Desember



6.3. Penanaman Modal

Tabel 6.4. Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Rencana Investasi (Jutaan Rp)	Rencana Tenaga Kerja	
			TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	1	3.743.290,00	515	-
Kotabaru	16	102.072,60	130	-
Banjar	101	1.621.364,00	2.018	-
Barito Kuala	-	-	-	-
Tapin	12	280.530,30	698	-
HSS	-	-	-	-
HST	-	-	-	-
HSU	-	-	-	-
Tabalong	1	1.458,60	5	-
Tanah Bumbu	5	2.455.807,90	1.904	-
Balangan	5	9.753,00	129	-
Banjarmasin	29	291.851,00	796	-
Banjarbaru	30	550.145,30	605	-
KALIMANTAN SELATAN	200	9.056.272,70	6.800	-

Sumber : BKPMD Prov Kalsel

Investasi atau penanaman modal merupakan variabel ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian. Beberapa teori ekonomi menyebutkan betapa pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan output. Investasi akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baik kegiatan baru maupun kegiatan ekonomi yang telah ada. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi



rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Tabel 6.5. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Rencana Investasi (Jutaan Rp)	Rencana Tenaga Kerja	
			TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	2	150.585,00	121	-
Kotabaru	-	-	-	-
Banjar	1	1.505,80	5	-
Barito Kuala	-	-	-	-
Tapin	-	-	-	-
HSS	-	-	-	-
HST	-	-	-	-
HSU	-	-	-	-
Tabalong	1	1.458,60	5	-
Tanah Bumbu	2	1.385.600,00	1.002	-
Balangan	-	-	-	-
Banjarmasin	6	266.172,60	671	-
Banjarbaru	6	288.645,80	228	-
KALIMANTAN SELATAN	18	2.093.967,80	2.032	-

Sumber : BKPM D Prov Kalsel

*) LKPM : data realisasi investasi dan tenaga kerja berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal

Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai revisi UU 11/1970 tentang PMA dan UU No 12/1970 tentang PMDN. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.



Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan “asas kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Pengaturan berinvestasi sesuai UU ini sebagai salahsatu bentuk upaya dalam memberikan rasa aman berinvestasi di negara kita.

Upaya-upaya positif lainnya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menarik minat investor adalah dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi investasi serta pemberian fasilitas bagi investor yang akan menanamkan modalnya.

Tabel 6.6. Proyek-proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Kal-Sel Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Rencana Investasi (US\$)	Rencana Tenaga Kerja	
			TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	2	123.037,00	110	-
Kotabaru	-	-	-	-
Banjar	3	4.455,40	77	-
Barito Kuala	-	-	-	-
Tapin	12	280.530,30	698	-
HSS	-	-	-	-
HST	-	-	-	-
HSU	-	-	-	-
Tabalong	1	1.458,60	5	-
Tanah Bumbu	5	2.455.807,90	1.904	-
Balangan	5	9.753,00	129	-
Banjarmasin	29	291.851,00	796	-
Banjarbaru	30	550.145,30	605	-
KALIMANTAN SELATAN	87	3.717.038,50	4.324	-

Sumber : BKPM D Prov Kalsel

Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Kalimantan Selatan baik PMA maupun PMDN menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Menurut data BKPM, pada tahun 2016 investasi PMDN yang sudah terealisasi di Kalimantan Selatan sebesar 2,09 triliun rupiah sedangkan realisasi investasi PMA mencapai 371,5 US\$. Untuk investasi PMDN mampu memperkerjakan TKI sebanyak 2.032 orang, sedangkan investasi PMA mampu memperkerjakan TKI sebanyak 1.812 orang. Sementara itu, rencana investasi (PMDN dan PMA) yang dilaporkan ke BKPM pada tahun 2016 masing-masing sebesar 9,06 triliun rupiah dan 3,7 juta US Dollar.

Mengingat era pasar bebas ASEAN sudah di depan mata, di mana produk-produk yang diperdagangkan harus berdaya saing dan memiliki nilai lebih, maka investasi di bidang pengolahan lanjutan sumber daya alam seyogyanya menjadi skala prioritas. Karena jika hanya berkutat pada industri pengolahan barang setengah jadi, di samping nilai tambahnya rendah, tenaga kerja yang diserap pun sedikit, dan yang pasti daya kompetitif maupun komparatif di kancah regional secara otomatis juga rendah.

Sebagai wilayah yang strategis dan memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Kota Banjarbaru memiliki potensi yang besar menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Kalimantan Selatan. Tahun 2016, rencana proyek PMDN yang terealisasi di Kota Banjarbaru sebesar 550,14 juta rupiah, yang terealisasi sebesar 288,64 juta rupiah. Sayangnya, pada tahun yang sama, tidak ada investasi PMA yang terealisasi, yaitu dari rencana proyek PMA di Kota Banjarbaru sebesar 550,14 ribu US Dollar, tidak ada yang terealisasi. Untuk meningkatkan minat investor asing dalam berinvestasi di Kota Banjarbaru salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memangkas rantai birokrasi



dalam pemberian perizinan. Selain itu pemberian insentif bagi investor yang mau menanamkan modal juga bisa dilakukan.

Tabel 6.7. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah disetujui Pemerintah menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Rencana Investasi (US\$)	Rencana Tenaga Kerja	
			TKI	TKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	2	8.296,00	122	-
Kotabaru	2	18.082,80	350	-
Banjar	-	-	-	-
Barito Kuala	1	1.758,10	915	-
Tapin	-	-	-	-
HSS	-	-	-	-
HST	-	-	-	-
HSU	-	-	-	-
Tabalong	2	322.958,30	341	-
Tanah Bumbu	1	20.404,20	84	-
Balangan	-	-	-	-
Banjarmasin	-	-	-	-
Banjarbaru	-	-	-	-
KALIMANTAN SELATAN	8	371.499,40	1.812	-

Sumber : BKPMD Prov Kalsel

*) LKPM : data realisasi investasi dan tenaga kerja berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal



KETIMPANGAN PENDAPATAN

7



7

KETIMPANGAN PENDAPATAN

Masalah yang umumnya sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi sering dikenal sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Perhatian pembangunan di negara-negara berkembang sebagian terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan bersamaan. Di awal-awal masa orde baru, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintah orde baru lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan terus berharap adanya *trickle down effect* pertumbuhan ke masyarakat kelas bawah.

Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus dihadapi mengingat masalah kesenjangan itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyulitkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Ketimpangan yang tidak segera diatasi akan berakibat lebih parahnya kondisi tersebut hingga



pameo klasik “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin” semakin terbukti. Ungkapan pameo itu adalah wujud dari potret nyata ketimpangan yang terjadi dewasa ini bahwa semakin lebar jurang pendapatan antara kaya dan miskin.

Secara harfiah, **ketimpangan pendapatan** didefinisikan sebagai gambaran dari sebuah pendistribusian pendapatan masyarakat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40% pada penduduk lapisan bawah/terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. *World Bank* (Bank Dunia) membagi pendapatan masyarakat yang diurutkan dari paling rendah sampai ke paling tinggi yang dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu:

1. Jumlah proporsi pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah.
2. Jumlah proporsi pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan sedang/menengah.
3. Jumlah proporsi pendapatan yang diterima oleh 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Berdasarkan kategori diatas, *World Bank* kemudian membagi ketimpangan pendapatan menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. Ketimpangan Pendapatan Tinggi (*highly inequality*)
2. Ketimpangan Pendapatan Rendah (*low inequality*)
3. Ketimpangan Pendapatan Sedang (*moderate inequality*)

Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan



kumuh di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kawasan-kawasan pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata dari adanya suatu ketimpangan yang terjadi. Yang mungkin akan memperparah kondisi ketimpangan adalah ketika ketimpangan itu sendiri membuat terjadinya perbedaan aksesibilitas faktor produksi. Perbedaan ini akan menambah ketimpangan, karena adanya kekurangan akses faktor produksi semisal modal, SDA akan semakin memperkecil peluang adanya persamaan pendapatan antara golongan ekonomi penduduk.

Menurut para pakar, ketimpangan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor pasar (*market forces*) dan faktor institusi (*institutional forces*). Keduanya bekerja secara terpisah tetapi berakhir pada titik yang sama. **Faktor pasar** muncul akibat adanya proses globalisasi yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan *skill* tertentu, sehingga mereka yang memiliki *skill* tersebut akan mengalami peningkatan pendapatan terutama di kalangan yang melek teknologi dan hal sebaliknya terjadi pada mereka yang mengalami ketertinggalan *skill* tersebut yang akan tergerus oleh arus globalisasi. Sementara itu **faktor institusi** terlihat dari keberpihakan institusi dalam mendesain struktur perekonomian suatu daerah. Faktor institusi ini terefleksi dalam berbagai kebijakan pemerintah dimana akan terlihat apakah kebijakan yang dihasilkan akan *bias* pada kelompok tertentu atau mampu menjaga integritas dengan menomorsatukan *kebersamaan*, yang ditandai dengan adanya kesempatan bagi seluruh rakyat untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi dan politik, tanpa ada pembedaan perlakuan. Disisi lain, adanya keragaman karakteristik di suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, hal ini akan berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh dan pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh



lambat. Selanjutnya kemampuan tumbuh yang berbeda ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah.

7.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Dalam beberapa studi empiris terdapat dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini dan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antardaerah juga penting untuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi di beberapa pusat pertumbuhan seperti pada level nasional berada di kawasan barat Indonesia (KBI). Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari separuh, kemudian Pulau Sumatera dan sisanya di Kawasan timur Indonesia (KTI).

Ketimpangan antardaerah di Indonesia dapat diukur dengan indeks *entropi Theil*. Indeks entropi menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lain. Keunggulan utama indeks ini adalah pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan subdaerah dalam suatu negara. Indeks ini digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi Industri. Dalam indeks Entropi ini merupakan indeks konsentrasi spasial yang menyediakan ukuran derajat konsentrasi distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan pada suatu titik waktu. Nilai indeks entropi yang lebih rendah berarti menunjukkan adanya kesenjangan yang rendah, dan sebaliknya (Mudrajat Kuncoro, 2004).



Myrdal (1957) mengemukakan teori ketimpangan yang menerangkan ketimpangan antar daerah dengan membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, Myrdal menggunakan ide *spread effect* dan *backwash effect* sebagai bentuk pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang.

Teori Gunnar Myrdal menekankan proses divergen yang menyebabkan ketimpangan makin melebar. Fenomena ini dijelaskan Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (*cumulative causation/CC*). Myrdal (1957) menyebut adanya dampak kurang menguntungkan untuk menjelaskan fenomena meningkatnya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Ia berpendapat, *backwash effect* lebih besar daripada dampak penyebaran. Dampak penyebaran adalah dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi ke daerah yang relatif tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian (misalnya bahan pangan), bahan baku, serta barang konsumsi yang dihasilkan industri kecil. Inilah yang minim terjadi di Indonesia karena: (1) produk pertanian dan industri masih banyak yang diimpor dari luar; (2) lemahnya keterkaitan antara usaha besar dan kecil.



Teori Myrdal tentang CC tak menyangkal adanya kemungkinan proses konvergen akibat dampak penyebaran. Penyebabnya adalah faktor-faktor “non-ekonomi” atau kelembagaan. Karena itu, analisis proses pembangunan yang hanya menekankan faktor ekonomi menjadi kurang relevan karena faktor kelembagaan, historis, sosial, dan kultural juga berperan. Meski kinerja ekonomi pascakrisis cenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia.

Teori lain dikemukakan oleh **Kuznets** (1955) yang menjelaskan suatu hipotesis yang terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”. Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata-nya yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.



7.2 Mengukur Ketimpangan Melalui Kurva Lorenz dan Gini Ratio

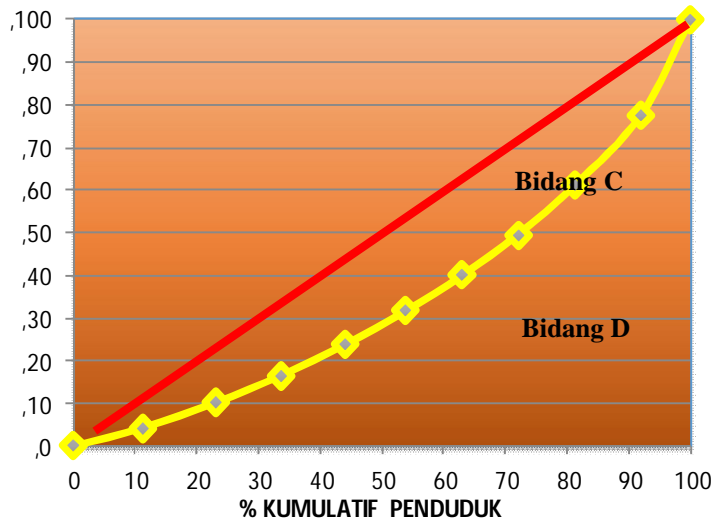
Hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan distribusi pendapatan sering digambarkan secara grafis dengan Kurva Lorenz, sementara ukuran umum yang biasa digunakan untuk melihat distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi disebut Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Secara grafis, hubungan dan perpaduan antara kurva Lorenz dan Gini Ratio dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Pada gambar tersebut dapat dilihat sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan dan sumbu horizontal menunjukkan persentase jumlah penduduk, sedangkan garis diagonal adalah garis yang menggambarkan pemerataan pendapatan sempurna. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis yang melengkung di bawah garis diagonal. Semakin dekat posisi garis Lorenz ke garis diagonal, berarti semakin merata pendapatan. Sebaliknya bila garis Lorenz semakin menjauhi garis diagonal, berarti semakin tidak merata pendapatan yang berarti juga semakin banyak kecenderungan orang miskin di wilayah tersebut.

Koefisien Gini pada gambar di bawah didefinisikan sebagai luas bidang A dibagi luas bidang A+B. Secara ekstrim, jika $A=0$ maka koefisien Gini menunjukkan nilai 0 yang berarti terjadi distribusi pendapatan yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis, sedangkan jika $B=0$ maka koefisien Gini menunjukkan nilai 1 yang berarti terjadi ketimpangan sempurna yaitu hanya terdapat satu orang yang memiliki segalanya sedangkan yang lain tidak memiliki apa-apa. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Semakin kecil nilai koefisien Gini mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan dan sebaliknya.



**Grafik 7.1. Distribusi Pendapatan Penduduk
Kota Banjarbaru Tahun 2015**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Kurva lorenz untuk Kota Banjarbaru pada tahun 2015 dapat dilihat dari Grafik 7.1. Garis diagonal (warna Merah) adalah merupakan garis pemerataan sempurna. Jika jarak kurva lorenz jauh dari garis diagonal, maka distribusi pendapatan kurang merata atau terjadi ketimpangan, akan tetapi jika kurva lorenz jaraknya dekat dengan garis diagonal maka distribusi pendapatan cenderung lebih merata.

Pada hakekatnya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah adalah hal yang tidak dapat terhindarkan baik itu di daerah yang miskin, daerah sedang berkembang, bahkan daerah yang tergolong maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing daerah.

7.3 Menghitung Ketimpangan Pendapatan Kota Banjarbaru

Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh relative cukup baik meskipun dalam periode terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi sejatinya diharapkan akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dengan mengurangi sedikit demi sedikit kesenjangan ekonomi. Setiap stakeholder yang terlibat pembangunan ekonomi di Kota Banjarbaru menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Konsep pertumbuhan berkualitas lebih menekankan pertumbuhan yang mendorong meningkatnya kesempatan kerja lokal dan mampu menurunkan kemiskinan serta mengurangi kebocoran pertumbuhan ke luar wilayah. Muara dari pertumbuhan berkualitas tentunya adalah kesejahteraan masyarakat yang cukup merata. Namun disadari atau tidak, proses ekonomi merupakan proses dalam masyarakat yang rasional dan bisa jadi lebih menguntungkan pemilik modal.

Mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah memang tidak sederhana, butuh pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik ekonomi regional dan karakteristik penduduk serta struktur tenaga kerjanya agar gambaran ukuran ketimpangan lebih jelas dan mampu menghasilkan solusi praktis untukantisipasi di masa yang akan datang. Mengukur ketimpangan dengan gini ratio berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Dari tahun 2011-2015, data gini ratio Kota Banjarbaru menunjukkan tren yang semakin naik.



**Tabel 7.1. Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2011-2015**

Tahun	Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi
(1)	(2)	(3)
2011	0,339	5,99
2012	0,370	6,54
2013	0,361	6,59
2014	0,365	6,63
2015	0,352	6,86

Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan Gini Ratio baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria bank dunia.

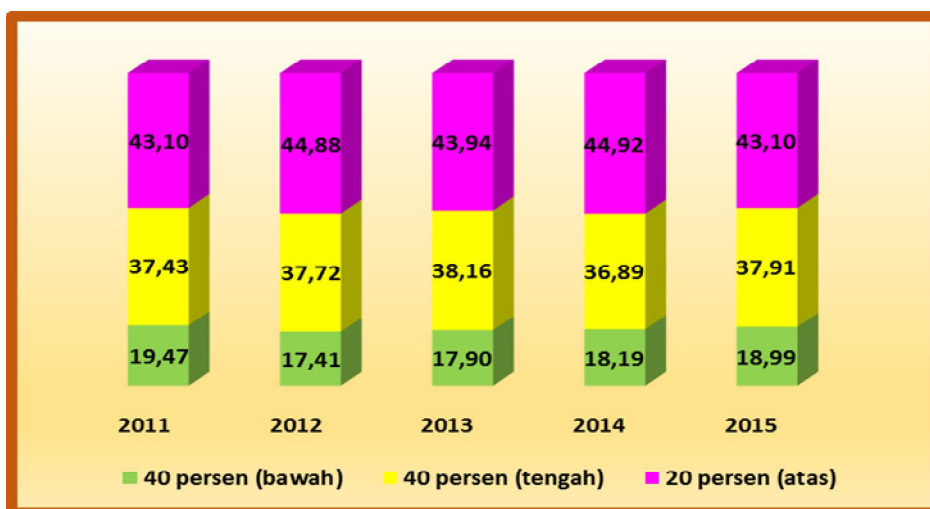
Kriteria Bank Dunia ini, membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yakni 20 % penduduk berpendapatan tinggi, 40 % berpendapatan menengah dan 40 % berpendapatan rendah. Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya, kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah, dan kelompok ketiga adalah bagian dari populasi termiskin.



Relative inequality diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Adapun kriteria *relative inequality* adalah :

1. *High inequality* (distribusi pendapatan sangat timpang/tinggi), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.
2. *Moderate inequality* (ketimpangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.
3. *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

Grafik 7.2. Distribusi Pendapatan Perkapita Kota Banjarbaru Menurut Kriteria World Bank Tahun 2011-2015 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Banjarbaru dari tahun 2011-2015 tergolong relatif rendah atau tidak terlalu timpang (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh kelompok 40 persen dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan diatas 17 persen dari total pendapatan regional penduduk Kota Banjarbaru.

Distibusi Pendapatan penduduk di Propinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan hampir sama yaitu berada pada level *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah menurut Kriteria Bank Duinia dan level Ketimpangan Sedang menurut Koefisien Gini Ratio. Ini karena hampir semua Kabupaten/Kota pendukungnya berada pada level yang sama juga.

Satu-satunya Kabupaten yang agak berbeda tingkat distribusi pendapatannya adalah kabupaten HSU. Kabupaten ini ditinjau dari Koefisien Gini berada pada level yang sama dengan Kabupaten Lainnya yaitu pada ketimpangan sedang, namun ternyata penduduk dengan 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah di kabupaten ini hanya menikmati pendapatan 14,27 persen dari seluruh pendapatan regional, artinya berdasarkan kriteria world Bank distribusi pendapatan Kabupaten HSU berada pada level *Moderate inequality* (ketimpangan dianggap sedang), yaitu jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan daerahnya.

Dibanding dengan angka gini di tingkat Propinsi maka secara rata-rata selama lima periode terakhir ini ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Banjarbaru masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah umum Kalimantan Selatan. Sementara untuk kriteria World Bank, walau berada pada level yang sama tetapi angka disribusi pendapatan 40 Persen kelompok pengeluaran terendah ini masih lebih rendah dengan keadaan Propinsi Kalimantan selatan.



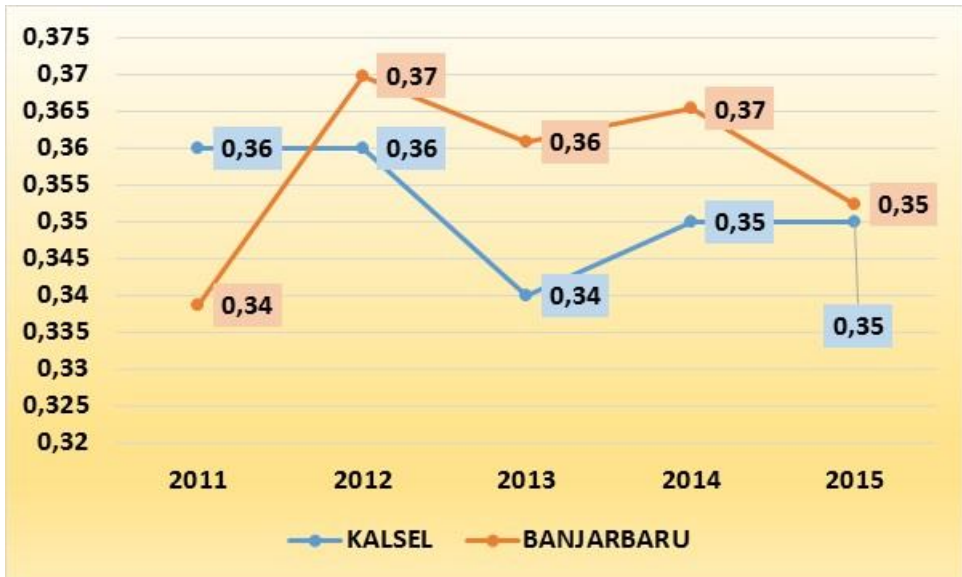
Tabel 7.2. Distribusi Pendapatan Per Kapita Menurut Kriteria World Bank dan Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2015 (Persen)

Kabupaten/ Kota	Total Pengeluaran			Gini Ratio
	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALSEL	19,53	36,89	43,58	0,353
Tanah Laut	23,78	39,10	37,12	0,272
Kota Baru	19,51	37,50	42,98	0,349
Banjar	20,87	38,55	40,58	0,320
Barito Kuala	19,27	35,55	45,18	0,366
Tapin	20,41	36,16	43,43	0,345
HSS	21,57	37,92	40,51	0,312
HST	21,13	36,49	42,39	0,327
HSU	14,27	40,57	45,16	0,359
Tabalong	22,26	39,96	37,78	0,285
Tanah Bumbu	20,66	37,24	42,10	0,333
Balangan	18,62	32,39	48,99	0,403
Banjarmasin	17,47	36,59	45,94	0,388
Banjarbaru	18,99	37,91	43,10	0,352

Sumber: BPS Provinsi Kalsel, data diolah



Grafik 7.3. Gini Ratio Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Angka Gini dan World Bank yang berfluktuasi setiap tahunnya ini dapat menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah daerah agar pada tahun berikutnya ketimpangan tidak semakin meningkat hingga berada pada level yang mengkhawatirkan. Ketimpangan yang terjadi ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan aksesibilitas penduduk terhadap sumberdaya alam, serta kualitas sumberdaya manusia. Kedua faktor ini saling berkaitan erat dalam menciptakan peluang kerja dan kesempatan kerja. Sehingga pengelolaan yang baik terhadap kedua faktor ini akan sangat menentukan dalam peningkatan pembangunan suatu daerah yang pada akhirnya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7.3. Kriteria World Bank Propinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan 40% terbawah	
	Kal-Sel	Banjarbaru
(1)	(2)	(3)
2011	18,84	19,47
2012	18,53	17,41
2013	19,67	17,90
2014	20,35	18,19
2015	19,53	18,99

Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

7.4 Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat meningkatnya ketimpangan pendapatan bisa menjadi cukup serius, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam mengkaji persoalan dari penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan ini, sesungguhnya terdapat dua perspektif, yang pertama persoalan ini bisa saja terjadi terjadi akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang kurang tepat dan bersifat struktural dimana seharusnya kebijakan yang diambil tidak hanya menyokong satu sektor saja melainkan pemerataan di seluruh sektor dan kebijakan itu tidak terpusat di wilayah tertentu saja melainkan kesemua wilayah yang ada sehingga ketimpangan pendapatan bisa dikurangi. Pada perspektif ini model pembangunan ekonomi yang diperlukan adalah model yang secara serentak



bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh masyarakat sebagai partisipan.

Perspektif yang kedua, ketimpangan yang terjadi bisa jadi bukan merupakan akibat dari produk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah yang memprioritaskan sektor tertentu, melainkan akibat praktek pembagian yang tidak adil antar faktor produksi ekonomi yang dibuat oleh pelaku atau pemilik modal itu sendiri, sebagai contoh sistem "*share cropping*" (bagi hasil) di sektor pertanian, pembagian pendapatan cenderung ditentukan secara sepihak oleh pemilik lahan akibat posisi tawar mereka yang jauh lebih kuat dibandingkan buruh tani akibatnya pembagian pendapatan yang tidak sepadan antara pemilik lahan dan buruh tani.

Kedua perspektif diatas disadari atau tidak memang secara nyata telah banyak terjadi dalam proses pembangunan yang berjalan selama ini tetapi yang perlu kita waspadaai adalah ketika kedua perspektif tadi berkolaborasi menjadi satu maka ketimpangan pendapatan itu justru akan semakin menjadi jadi. Ketidaksadaran atas hal ini seolah olah menjadi sebuah pembiaran yang turut mendukung semakin melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin. Beberapa strategi implikasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan pendapatan, antara lain:

- ✓ Menyediakan pendidikan dan kesehatan terjangkau bagi masyarakat miskin merupakan upaya penting untuk menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan *skill*/kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga terjadi *multiplier effect* yang dapat menekan angka pengangguran.
- ✓ Meminimalkan bertambahnya pekerja di sektor informal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian dan industri) sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Untuk sektor



pertanian misalnya dengan mendorong petani beralih ke tanaman yang nilai ekonomisnya lebih tinggi misalnya ke tanaman hortikultura. Pembatasan atau penghapusan sistem alihdaya (outsourcing) bisa pula dipertimbangkan agar tidak mudah terjadi PHK yang kemudian mendorong orang bekerja di sektor informal.

- ✓ Untuk mengurangi kesenjangan kemampuan individu, pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi. Cara ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mereka mendapatkan keahlian. Melalui kemampuannya upah yang lebih baik akan didapat. Alhasil gap pendapatan diperkecil.



PERKEMBANGAN DATA KEMISKINAN

8



8

PERKEMBANGAN DATA KEMISKINAN

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan tentang kesejahteraan rakyat adalah informasi tentang situasi perekonomian masyarakatnya terutama dilihat dari tingkat kemiskinan masyarakat suatu daerah tersebut.

Kemiskinan dapat dibedakan dari dua sisi sudut pandang yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang bersifat absolut bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan suatu standar tertentu tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat secara umum. Sedangkan kemiskinan dapat juga dipandang sebagai suatu kondisi yang bersifat relatif bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Jika menggunakan standar absolut, standar kemiskinan konsumsi (garis kemiskinan) dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup layak dan kebutuhan non-makanan tertentu tanpa memperhitungkan tingkat konsumsi seluruh penduduk. Di Indonesia, angka kemiskinan absolut dihitung menggunakan garis kemiskinan



(GK). GK adalah ukuran atau indikator kesejahteraan yang menunjukkan kemampuan daya beli yang sama dari tahun ke tahun. Standar ini tidak akan berubah walaupun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Dengan demikian, kemiskinan absolut ini paling sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan kemiskinan antarwaktu.

Jika menggunakan standar relatif, standar kemiskinan akan dihitung berdasarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara umum. Tentunya standar ini akan berubah antar-waktu dan antar-tempat. Kemiskinan relatif ini sangat relevan khususnya apabila Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan hanya difokuskan pada segmen termiskin tertentu, misalnya pada 10% atau 20% termiskin dari populasi. Pada saat inilah pendekatan kemiskinan relatif lebih tepat untuk digunakan. Berbeda tujuan dengan kemiskinan absolut yang digunakan untuk evaluasi naik-turunnya tingkat kemiskinan, pendekatan kemiskinan relatif ditujukan sebagai dasar perhitungan atau pertimbangan dalam mendesain program yang ditargetkan untuk membantu masyarakat miskin. Pada taraf yang lebih luas tujuan segmentasi kemiskinan dalam pendekatan relatif adalah untuk menyediakan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi distribusi kemiskinan saat ini agar dapat digunakan oleh program penargetan kemiskinan dalam menyusun strategi dan jumlah target yang sesuai antara anggaran dan kebutuhan tiap tingkatan masyarakat atau dapat juga dimanfaatkan untuk menyusun strategi pembangunan pada setiap level pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

Sehubungan itu, BPS sudah sejak lama memiliki peran besar dalam mengumpulkan, menganalisis, mendistribusikan dan mempublikasikan hasil analisis dan pendataan terhadap masyarakat berbasis rumah tangga, terutama



berkaitan dengan pengukuran kemiskinan. Pengukuran kemiskinan tahunan menggunakan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), yang menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan daerah, merupakan estimasi yang bersifat makro; sementara terkait langsung dengan kebutuhan Program Perlindungan Sosial, BPS juga mengadakan PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) atau yang sekarang disebut PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Data yang dikumpulkan dalam PPLS/PBDT adalah data 40% terbawah dari seluruh populasi penduduk, yang mengandung informasi lengkap nama dan alamat rumah tangga sasaran (RTS) untuk Program Perlindungan Sosial. Rincian data yang dikumpulkan dalam PPLS/PBDT dapat juga disebut sebagai data kemiskinan mikro.

8.1. KEMISKINAN

Pengukuran kemiskinan secara umum memakai standar dari Bank Dunia. BPS dalam menghitung kemiskinan menggunakan konsep dan definisi baku tentang kemiskinan. Menurut BPS, kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

- **Pertama**, Head Count Index (HCI-P₀), yaitu persentase penduduk yang



berada di bawah garis kemiskinan

- **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan
- **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Hasil survey BPS menyebutkan tren kemiskinan di Kota Banjarbaru selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara jumlah agregat maupun relatif kecuali di tahun 2015 yang mengalami kenaikan. Di tahun 2015 secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 4,90 persen lebih tinggi dari tahun 2014 yang



hanya sebesar 4,35 persen. Sedangkan pada tahun 2016, persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru kembali menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 4,62 persen.

Tabel 8.1. Indikator Kemiskinan Kota Banjarbaru
Tahun 2012-2016

Keterangan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Miskin (jiwa)	11.126	9.997	9.965	11.460	11.060
Persentase Penduduk Miskin (persen)	5,16	4,50	4,35	4,90	4,62

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

8.1.1 Garis Kemiskinan

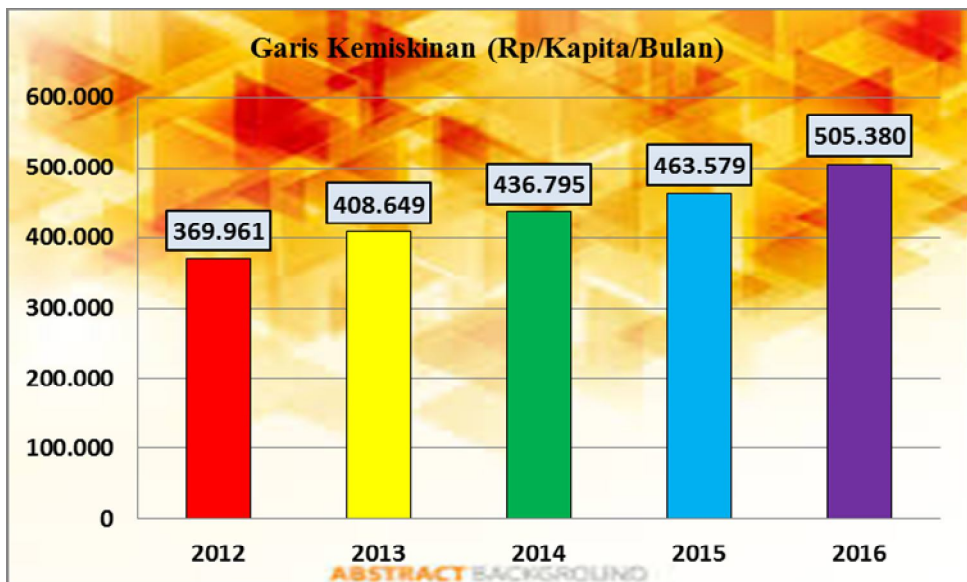
Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis kemiskinan. Metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh BPS dilakukan dengan pendekatan *benchmark* garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Pendekatan GK makanan digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 Kilo kalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa. Garis kemiskinan Kota



Banjarbaru tahun 2016 sebesar 505.380 rupiah/kapita/bulan. Dibanding tahun 2015, garis kemiskinan Kota Banjarbaru 2016 mengalami kenaikan sebesar 9,02 persen. Sebagai pembandingan, inflasi 2016 tercatat 3,68 persen dan sebesar 5,03 persen di tahun 2015.

Grafik 8.1.
Garis Kemiskinan di Kota Banjarbaru, 2012-2016



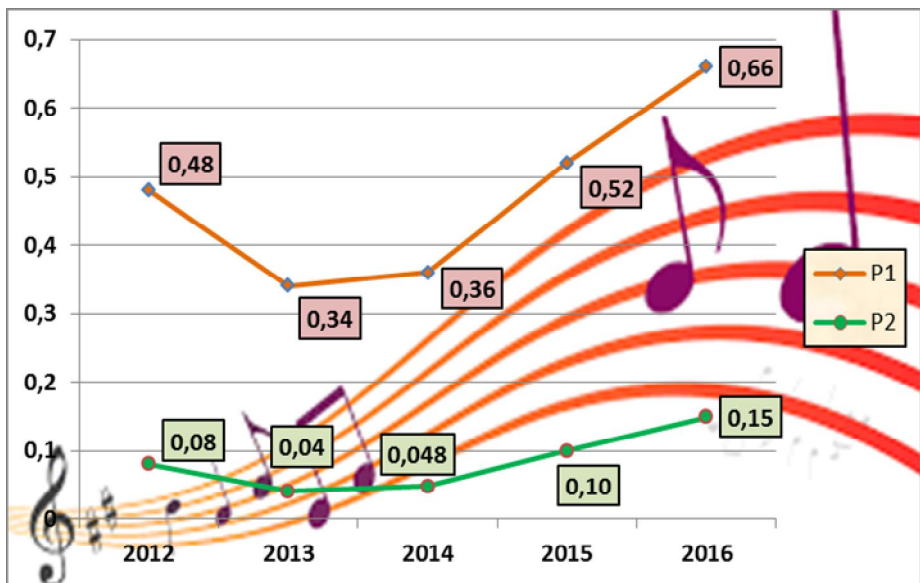
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

8.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 8.2.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
Kota Banjarbaru, 2012-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Selama lima tahun terakhir Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Banjarbaru cenderung mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Banjarbaru mengalami kenaikan dari 0,52 pada tahun 2015 menjadi 0,66 di tahun 2016, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,10 pada tahun 2015 menjadi 0,15 di tahun 2016.

Kenaikan kedua nilai indeks (Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan) tahun 2016 ini selaras dengan kenaikan jumlah penduduk

miskin di Kota Banjarbaru hal ini mungkin dari imbas perlambatan ekonomi di daerah maupun di propinsi Kalimantan Selatan .

Tabel 8.2. Perbandingan dengan Kabupaten Kota Di Kalimantan Selatan

Kab/Kota	GK	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Tingkat Kedalamam (P1)	Tingkat Keparahan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	400.757	15.240	4,65	0,64	0,16
Kota Baru	369.147	14.780	4,56	0,62	0,11
Banjar	360.494	17.360	3,1	0,32	0,07
Barito Kuala	274.571	15.710	5,22	0,57	0,1
Tapin	369.153	6.810	3,7	0,25	0,03
Hulu Sungai Selatan	409.235	14.420	6,29	0,88	0,21
Hulu Sungai Tengah	322.392	16.220	6,18	0,62	0,1
Hulu Sungai Utara	385.338	15.380	6,76	0,83	0,17
Tabalong	406.481	15.400	6,35	0,92	0,24
Tanah Bumbu	408.481	17.480	5,27	1,07	0,31
Balangan	348.442	7.090	5,67	0,78	0,18
Banjarmasin	417.174	28.750	4,22	0,57	0,13
Banjarbaru	505.380	11.060	4,62	0,66	0,15
Kal-Sel	377.480	195.700	4,85	0,71	0,16

Tabel 8.2. di atas memperlihatkan bahwa Garis Kemiskinan antar Kabupaten/Kota berbeda, angka terendah ada di Barito Kuala (274.571) dan tertinggi di Banjarbaru (505.380). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk terhadap keranjang komoditas kebutuhan



dasar (*basic needs approach*) makanan dan non makanan antar daerah berbeda, demikian juga dengan harga masing-masing komoditas tersebut. Jika dilihat dari perbedaan GK tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang yang hidup di kota yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru harus lebih berupaya keras mengumpulkan rupiah untuk dapat bertahan hidup di atas garis kemiskinan, karena GKnya yang tinggi di banding dengan daerah lainnya. Ini berarti standar hidup di kota besar lebih tinggi dibanding hidup di daerah pinggiran lainnya.

Dilihat dari jumlah penduduk miskin; yaitu mereka yang memiliki pengeluaran berada di bawah GK, maka daerah yang terbanyak penduduk miskinnya adalah Kota Banjarmasin, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar. Tetapi jika dilihat dari persentase penduduk miskin; yaitu perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk, maka persentase tertinggi berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan persentase 6,76 persen. Terendah di Kabupaten Banjar, penduduk miskinnya hanya 3,1 persen.

Jika kesejahteraan penduduk di suatu daerah dilihat dari jumlah penduduk miskinnya maka daerah dengan Po kecil dapat dikatakan lebih sejahtera dari daerah lain yang Po nya lebih tinggi. Tapi jika dilihat dari upaya yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan maka yang terberat dalam melakukan pengentasan ini adalah yang terbanyak jumlah absolut penduduk miskinnya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin,



kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kedalaman kemiskinan (P_i) yang dialami kabupaten kota bervariasi, terdalam adalah di kabupaten Tanah Bumbu, dimana indeksinya mencapai 1,07 jauh dari garis kemiskinan di daerahnya yang sebesar Rp. 408.481. Kedalaman yang terendah di Kabupaten Tapin yang indeksinya hanya 0,25 dari garis kemiskinan Rp. 369.153. Indeks yang semakin dalam (tinggi) menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, boleh dikatakan semakin miskin.

Sementara keparahan kemiskinan sendiri adalah untuk memperlihatkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin tersebut, dimana Kesenjangan yang terparah antar penduduk miskin adalah di kabupaten Tanah Bumbu dengan indeks 0,31. Kesenjangan rendah mendekati 0 adalah Kabupaten Tapin dengan indeks 0,03 artinya kemiskinan yang ada di Kabupaten Tapin hampir merata tidak ada yang terlalu miskin, hal ini sebanding dengan indeks kedalamannya, yang tidak terlalu jauh dari Garis Kemiskinan. Dengan Kedalaman dan Keparahan yang rendah maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam Upaya pengentasan kemiskinan, kita perlu mengetahui siapa sajakah penduduk-penduduk yang dikategorikan miskin tersebut. Dimana letak atau kantong kemiskinan dari penduduk-penduduk tersebut lah yang kemudian mengharuskan kita meninjau kemiskinan ini dari sisi relatifitasnya atau kemiskinan relative. Kemiskinan relative menjadi dasar dalam penyusunan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk tingkat nasional dan Tim Koordinasi penanggulangan



Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk Tingkat daerah Kabupaten Kota. Hasil data base inilah yang kemudian dikelola untuk menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) bagi pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota.



PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

9



9

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Masalah ketenagakerjaan menjadi masalah yang rumit. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang yang relatif tinggi menyebabkan penambahan jumlah tenaga kerja menjadi relatif cepat, sementara itu kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja sangat terbatas. Akibat dua keadaan yang bertentangan tersebut, pertumbuhan penduduk biasanya dapat menimbulkan masalah seperti : struktur umur muda, jumlah pengangguran yang relatif tinggi, urbanisasi dan lain-lain.

Masalah yang paling pelik dan paling utama berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Adanya hubungan yang erat antara pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan, memaksa pemerintah berpikir keras mencari kebijakan-kebijakan yang mampu mengurangi angka pengangguran. Memperluas kesempatan kerja merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya menumbuhkan kreativitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

Kota Banjarbaru adalah kota dengan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru ini sebagian besar disebabkan oleh migrasi. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya daya tarik Kota Banjarbaru yang berada di lokasi pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan



Selatan. Dengan kondisi tersebut sudah selayaknya Kota Banjarbaru memiliki aturan dan kebijakan yang jelas mengenai ketenagakerjaan.

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi International Labour Orgnizatin (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku "Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment" An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara international, tanpa menegsampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Menurut konsep Labour Force Framework, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan sebagai berikut .

Gambar 9.1. Bagan Ketenagakerjaan



Penduduk usia kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja adalah penduduk yang beraktivitas sekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sudah tidak mampu bekerja, baik karena alasan kesehatan atau usia (misalnya pensiunan dan penerima pendapatan). Sedangkan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang aktif berusaha mencari pekerjaan (pengangguran).

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Namun besarnya penawaran belum tentu sebanding dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, akan ada angkatan kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang disebut dengan pengangguran. Meskipun pengangguran tidak selalu berkorelasi positif dengan kemiskinan, namun penanganan terhadap tenaga kerja yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan ini tetap perlu mendapat perhatian khusus. Tanpanya, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menimbulkan berbagai masalah seperti kerawanan sosial.

9.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK di suatu daerah menunjukkan semakin besar ketersediaan jumlah tenaga kerja. Artinya peluang untuk memenuhi salah satu modal penggerak jalannya roda pembangunan semakin besar. Namun apabila pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang ada tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, maka peningkatan jumlah tenaga kerja ini akan menimbulkan permasalahan peningkatan jumlah pengangguran.



Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPak merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 9.1. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,06	61,85	61,27	60,18	64,86
- Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,31	91,54	97,41	94,65	96,33
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,69	8,46	2,59	5,35	3,67
Persentase Bukan Angkatan Kerja	32,94	38,15	38,73	39,82	35,14

Sumber : data Sakernas (diolah)

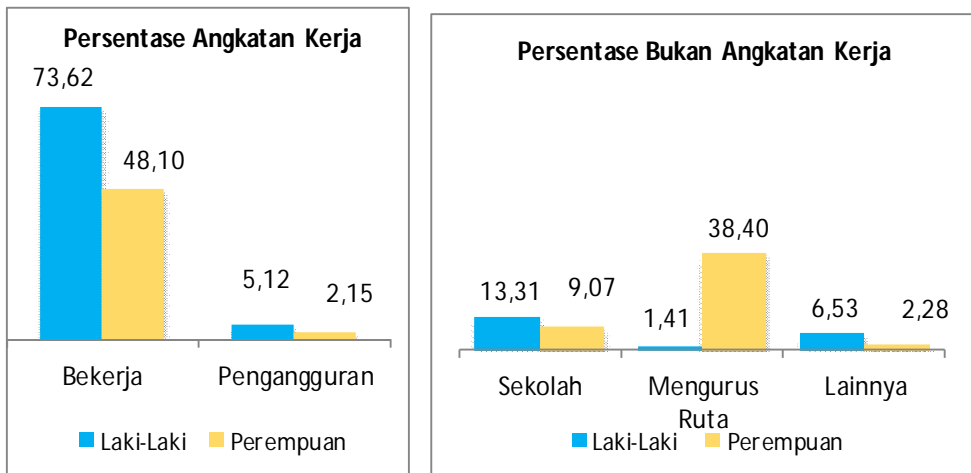
*) tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas

TPAK tahun 2015 sebesar 64,86 persen artinya pada tahun 2015 sekitar 64,86 persen penduduk usia 15 tahun ke atas termasuk golongan penduduk *Angkatan Kerja*, sedangkan 35,14 persen lainnya adalah golongan penduduk *Bukan Angkatan Kerja*. Kemudian dari total angkatan kerja tersebut 96,33 persen kegiatannya adalah bekerja dan 3,67 persen kegiatannya mencari pekerjaan.



Jika dilihat berdasarkan gender, maka secara kodrati bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah keluarga diperlihatkan oleh grafik 5.1. dimana di Kota Banjarbaru pada tahun 2015; Jumlah laki laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan perempuan, akan tetapi jumlah penganggurannya juga lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya untuk penduduk bukan usia kerja lebih didominasi perempuan dengan persentase tertinggi pada kegiatan mengurus rumah tangga.

Grafik 9.1. Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2015



Pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara alamiah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk baik karena kelahiran dan kematian maupun karena migrasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Banjarbaru mencapai 234 ribu orang lebih, dan sekitar 73 persennya merupakan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan tiap tahun, namun peningkatan ini tidak selamanya diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tabel 5.1. menunjukkan TPAK Kota Banjarbaru yang sempat mengalami penurunan di tahun 2012 tapi kemudian di tahun 2015 kembali meningkat, namun demikian hal yang menggembirakan adalah TKK yang selalu cenderung meningkat terus dari 93,31 menjadi 96,33 persen, berbanding terbalik dengan TPT yang cenderung menurun. Artinya bahwa lapangan kerja di Kota Banjarbaru telah mampu mengurangi tingkat pengangguran secara bertahap.

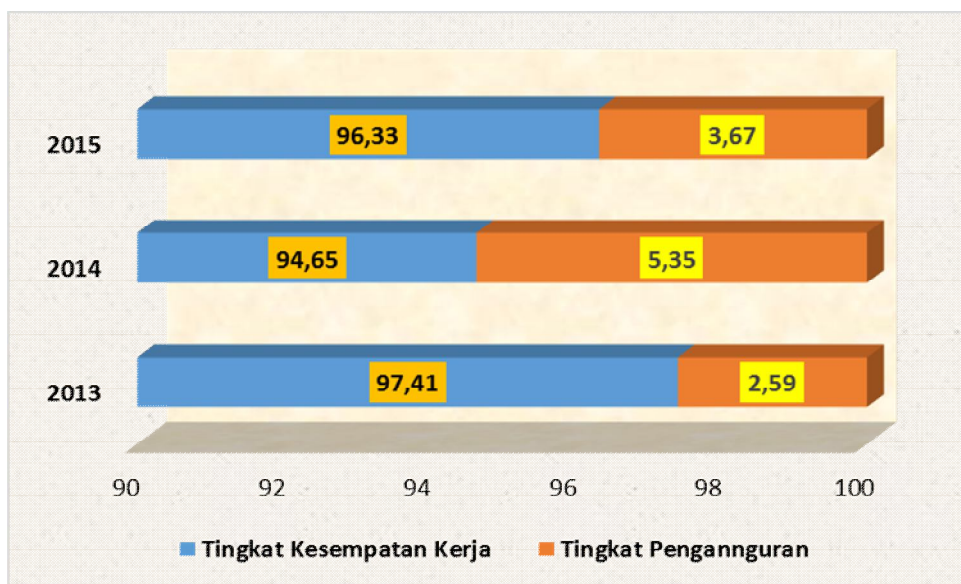
9.2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja

Salah satu inklusifitas pertumbuhan ekonomi menasar pada kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam aktifitas ekonomi (lapangan usaha) sangat diperlukan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan akan semakin memberikan multiplier efek besar bagi perluasan kesempatan kerja di daerah. Implikasinya, perhatian pemerintah sudah selayaknya lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi yang padat tenaga kerja. Semakin pertumbuhan ekonomi inklusif, maka tingkat pengangguran juga akan berangsur menurun.

Angka TPT Kota Banjarbaru dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik . Selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu dari 5,35 persen pada tahun 2014 turun menjadi 3,67 persen pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena berkembangnya lapangan usaha perdagangan serta jasa-jasa yang ada di Kota Banjarbaru selama tahun 2015.



Grafik 9.2. TPT dan Tingkat Kesempatan Kerja Di Kota Banjarbaru Tahun 2013-2015



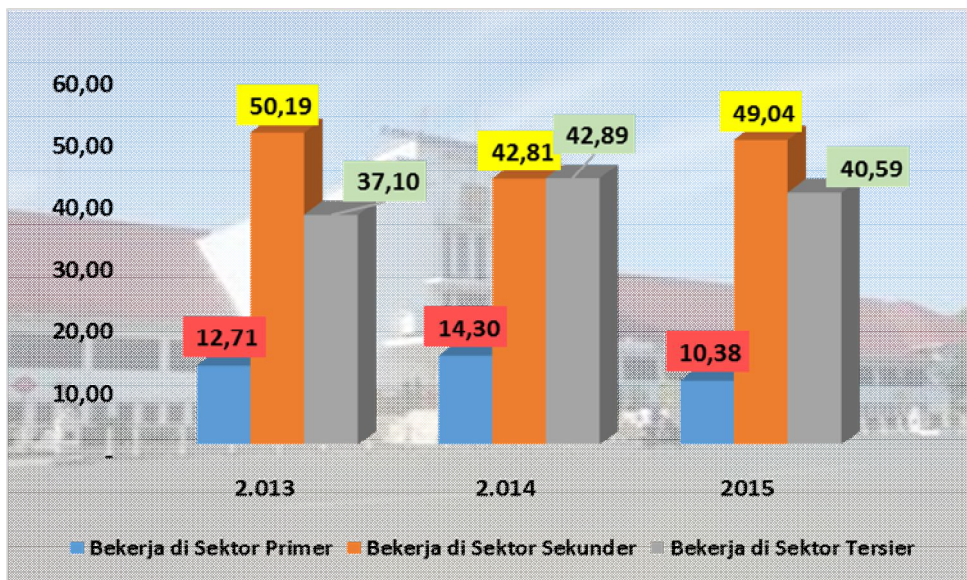
Sumber : data Sakernas (diolah)

Tingkat pengangguran terbuka terutama di perkotaan, hanya menyebabkan aspek-aspek yang kompleks dari masalah kesempatan kerja dan merupakan penampakan gunung es dari kejadian pengangguran. Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai karena angka tingkat pengangguran hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah menganggur (*under employment*), pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), dan pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka.

9.3. Daya Serap Tenaga Kerja

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan lapangan kerja baru atau memperbesar lapangan kerja yang ada di setiap lapangan usaha. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, maka pilihan bekerja di sektor tersier dan sekunder masih mendominasi pasar kerja di Kota Banjarbaru, bahkan persentasenya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sementara sektor primer paling sedikit dalam menyerap angkatan kerja. Ini seiring dengan struktur perekonomian Kota Banjarbaru yang lebih di dominasi oleh kelompok sektor tersier dan sekunder . Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha ini juga dapat di jadikan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

Grafik 9.3. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015



Sumber : data Sakernas (diolah)

Selama kurun waktu tahun 2013-2015 daya serap ketiga kelompok sektor ini nampak berfluktuasi, namun demikian kelompok sektor tersier dan sekunder masih merupakan kelompok dengan daya serap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2015 kelompok sektor tersier menyerap 40,59 persen angkatan kerja, sedangkan pada sektor sekunder dan primer masing-masing sebesar 49,04 persen dan 10,38 persen. Keadaan ini menunjukkan kesesuaian dengan dengan pola yang terdapat di daerah perkotaan, dimana sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor tersier.

9.4. Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran tingkat produktivitas pekerja diestimasi dengan menggunakan rasio PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah pekerja, sehingga secara langsung dapat menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah. Secara tidak langsung tingkat produktivitas pekerja di suatu daerah dapat menggambarkan efisiensi proses produksi akibat pemakaian teknologi, modal dan sumber daya lainnya.

Produktivitas tenaga kerja Kelompok sektor sekunder yang terdiri dari kategori industri, listrik dan air, dan bangunan, transportasi dan perdagangan merupakan kelompok sektor dengan tingkat produktivitas terbesar. Pada tahun 2015 tenaga kerja kelompok sektor ini mempunyai tingkat produktivitas sebesar 70,75 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Tingkat produktivitas tenaga kerja kelompok sektor tersier merupakan tingkat produktivitas tertinggi kedua pada perekonomian Kota Banjarbaru. Pada tahun 2015 rata-rata tenaga kerja kelompok sektor tersier mampu menciptakan nilai tambah sekitar 58,93 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sedangkan untuk tenaga kerja pada kelompok sektor primer merupakan tenaga kerja dengan produktivitas paling



rendah. Pada tahun 2015 tenaga kerja kelompok sektor ini menciptakan nilai tambah sekitar 37,07 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

Tabel 9.2. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Banjarbaru Tahun 2013- 2015

Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
	Tenaga Kerja (%)	Produktivitas Tenaga Kerja (000 Rp)	Tenaga Kerja (%)	Produktivitas Tenaga Kerja (000 Rp)	Tenaga Kerja (%)	Produktivitas Tenaga Kerja (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Primer	12,71	26.690	14,30	26.585	10,38	37.068
Sekunder	50,19	57.073	42,81	77.827	49,04	70.753
Tersier	37,10	53.502	42,89	53.469	40,59	58.927
Total	100,00	51.887	100,00	60.052	100,00	62.458

Sumber : data Sakernas (diolah)

*) tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas



**PERKEMBANGAN
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

10



10

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk mempebesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk, karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk menikmati kehidupan, melakukan kegiatan produktif, atau ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, dan sosial politik. Terdapat beberapa premis penting seputar pembangunan manusia yang menjadi fokus dalam diskusi-diskusi di UNDP, beberapa diantaranya adalah:



1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai fokus pembangunan (*People Centered Development*);
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*), tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Pada tahun 2016 ini, Badan Pusat Statistik mempergunakan perhitungan IPM dengan metode baru. Alasan mengapa dilakukan perubahan IPM ini adalah sebagai berikut :

1. UNDP sudah merubah metodologi perhitungan IPM sejak tahun 2010 dan revisi metodologi perhitungan pada tahun 2011.
2. Negara-negara lain, seperti India dan Filipina telah memulai mengaplikasikan perhitungan IPM dengan metode baru ini, bahkan India telah memulainya sejak tahun 2011.
3. Tersedianya data Angka Harapan Hidup saat lahir (e_0) hasil proyeksi SP2010.
4. Perubahan weight dalam susenas yaitu MYS dan EYS.
5. Perubahan proksi indikator daya beli.

Perbandingan perhitungan IPM dengan metode lama dan metode baru dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 10.1. Perbedaan Penghitungan IPM Metode Lama dan Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)
Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Angka Melek Huruf AMH	1. Expected Years of Schooling (EYS)	1. Expected Years of Schooling (EYS)
	2. Kombinasi APK	2. Mean Years of Schooling (MYS)	2. Mean Years of Schooling (MYS)	2. Mean Years of Schooling (MYS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita disesuaikan	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita disesuaikan

Keunggulan metode baru dalam perhitungan IPM ini dibandingkan dengan metode sebelumnya antara lain :

1. Perhitungan IPM dengan metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan lebih baik (diskriminatif)
 - a. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
 - b. Melek huruf tidak digunakan lagi karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik (angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi).



2. Capaian yang rendah pada salah satu komponen tidak dapat ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi (*Arithmetic mean* \Rightarrow *Geometric mean*).

Nilai maksimum dan minimum untuk setiap indikator pada perhitungan IPM dengan metode baru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10.2. Nilai Maksimum dan Minimum
Indikator IPM Metode Baru**

Indikator	MINIMUM		MAKSIMUM	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup (eo)(Tahun)	20	20	85	85
<i>Expected Years of Schooling /EYS (Tahun)</i>	0	0	18	18
<i>Mean Years of Schooling/MYS(Tahun)</i>	0	0	13,1	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan	100 (PPP US\$)	1.007.436 (I DR)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (I DR)

IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh (*shortfall*) suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100 yang berarti bahwa pembangunan manusia secara keseluruhan tersebut telah tercapai. Bagi suatu wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Dengan diterapkannya penghitungan IPM metode baru, maka angka-angka IPM sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah direvisi menggunakan metode baru. Sehingga angka IPM tahun 2011 s/d 2014 metode

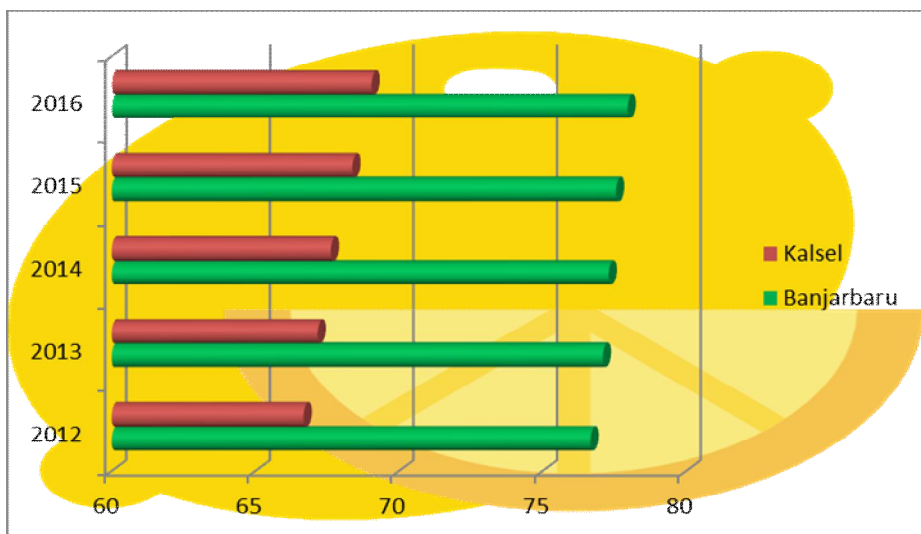


lama tidak digunakan lagi, atau tidak dapat digunakan sebagai pembanding dengan tahun 2016 metode baru.

Berdasarkan penghitungan IPM metode baru diketahui bahwa tahun 2011 hingga 2016 nilai IPM Kota Banjarbaru dan IPM Propinsi Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi jika dibandingkan maka nilai IPM Kota Banjarbaru berada diatas angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan , dimana tahun 2016 IPM Kota Banjarbaru sebesar 77,96 persen sedangkan IPM provinsi Kalimantan Selatan mencapai 69,05 persen.

Dilihat dari angka IPM-nya, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan di kota Banjarbaru termasuk cukup berhasil. IPM Kota Banjarbaru selalu menduduki peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya seperti pada grafik 7.1.

Grafik 10.1. Perkembangan IPM Kota Banjarbaru dan Kalimantan Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan kriteria dengan capaian IPM menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP, selama kurun waktu 2012-2016 Kota Banjarbaru masuk dalam tingkatan status atau kategori kinerja pembangunan manusia **Tinggi** yaitu dengan capaian IPM di antara 70,00 – 79,99.

Tabel 10.3. Kriteria dan Tingkatan Status Pembangunan Manusia Menurut UNDP

Tingkatan Status	Kriteria (Persen)
(1)	(2)
1. Rendah	IPM < 60
2. Sedang	$60 \leq \text{IPM} < 70$
3. Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
4. Sangat Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$

Sumber : BPS Provinsi Kalsel

Perkembangan tiga dimensi dasar pembentuk IPM Kota Banjarbaru ditunjukkan oleh tabel 10.4.

Tabel 10.4. Perkembangan Komponen IPM Kota Banjarbaru Tahun 2012 -2016

Tahun	Harapan Hidup		EYS		MYS		Pengeluaran (000)	
	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	71,05	67,11	14,55	11,54	10,48	7,48	12.180	10.553
2013	71,06	67,35	14,67	11,67	10,69	7,59	12.273	10.655
2014	71,06	67,47	14,73	11,96	10,74	7,60	12.376	10.748
2015	71,36	67,80	14,75	12,21	10,75	7,76	12.467	10.891
2016	71,43	67,92	14,77	12,29	10,76	7,89	12.879	11.307

Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan



10.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

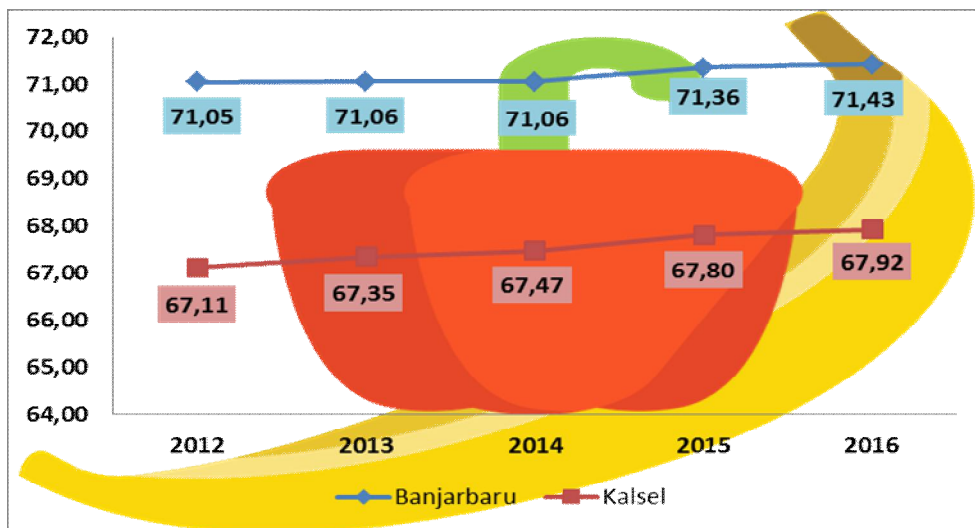
Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah Angka Harapan Hidup. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka Harapan Hidup menunjukkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan Kota Banjarbaru dapat dilihat dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (eo) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, akan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk.

AHH Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2016, capaian AHH berada pada usia 71,43 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kota Banjarbaru akan hidup sampai usianya 71 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kota Banjarbaru ini lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya mencapai usia 67-68 tahun, dimana AHH nya adalah sebesar 67,92 tahun.



Grafik 10.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

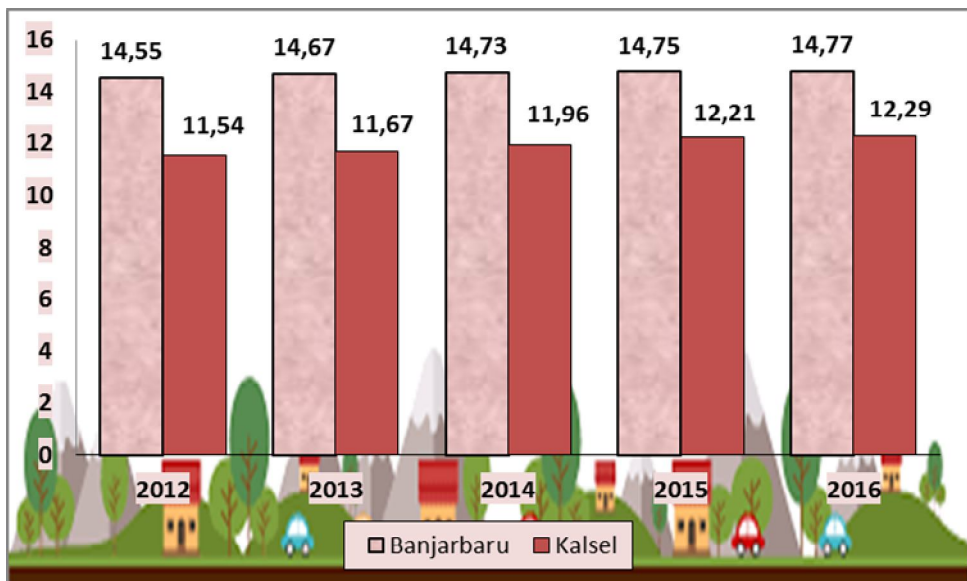
10.2. Harapan lama sekolah (*Expected Year Schooling*) dan Rata-rata lama sekolah (*Mean Year Schooling*).

Upaya memperbaiki profil pendidikan penduduk sudah merupakan suatu kewajiban suatu negara. Pesatnya perbaikan profil pendidikan tidak dapat dipungkiri sebagai komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan. Komitmen pemerintah didasarkan pada dua alasan yaitu **pertama**, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD 1945 alinea ke empat), dan **kedua**, anggapan bahwa pendidikan adalah kunci mencapai keunggulan bangsa.

Melalui perhitungan metode terbaru, indikator pendidikan diukur dengan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (MYS) dan rata-rata harapan lama

sekolah (EYS). Indikator rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan asumsi dalam keadaan normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan MYS ini adalah Susenas KOR.

**Grafik 10.3. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2012-2016**



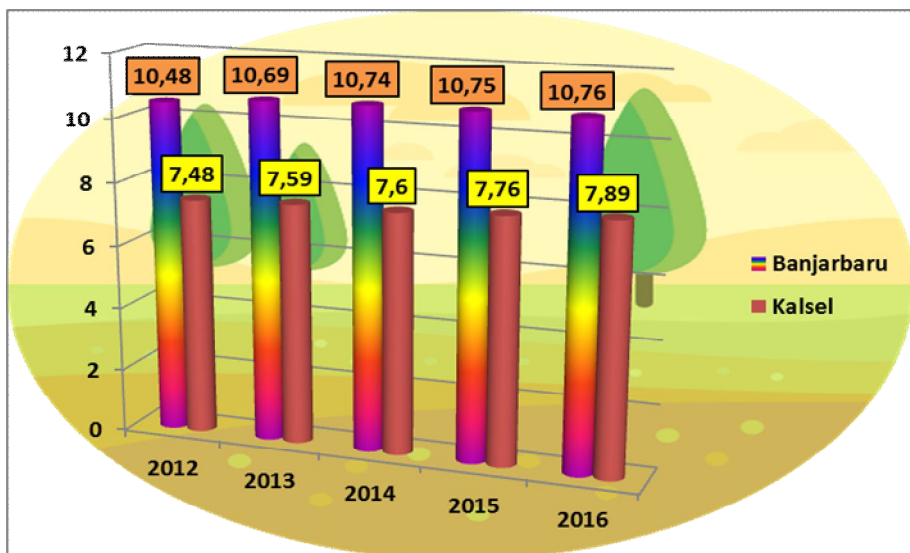
Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Rata-rata harapan lama sekolah (EYS) dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Kelemahannya adalah tidak meng-cover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. Penghitungan EYS dilakukan dengan empat langkah, yaitu menghitung jumlah penduduk menurut umur (7th ke atas);

menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7th ke atas); menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur; dan menghitung harapan lama sekolah. EYS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu : tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Grafik 10.3. menyajikan gambaran perubahan harapan lama sekolah di Kota Banjarbaru. Terjadi peningkatan harapan lama sekolah baik di Banjarbaru maupun Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012-2016. Angka harapan lama sekolah Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dari 14,55 tahun pada 2012 menjadi 14,77 tahun pada 2016. Hal sama terjadi pula untuk wilayah Kalimantan Selatan secara umum. Harapan lama sekolah meningkat dari 11,54 di tahun 2012 menjadi 12,29 di tahun 2016.

**Grafik 10.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2012-2016**



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

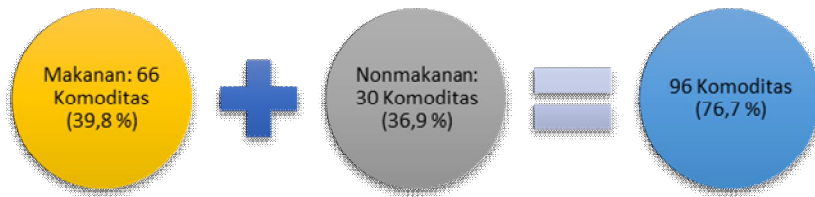
Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling/MYS*) di Kalimantan Selatan pada tahun 2016 mencapai 7,89 tahun sedangkan rata rata lama sekolah di Kota Banjarbaru sudah mencapai 10,76 tahun pada tahun yang sama. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru sampai pada tingkatan tamat SMA, sedangkan Kalimantan Selatan baru sampai pada tingkatan tamat SMP.

10.3. *Purchasing Power Parity*/Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (PPP)

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah.

Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata. Kemampuan daya beli ini diistilahkan sebagai *Purchasing Power Parity* (PPP). Komponen PPP atau dikenal sebagai komponen atau standar layak hidup dalam laporan ini diukur dengan menghitung nilai riil dari rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan (*PNB perkapita*). Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. Sedangkan pada metode baru, terpilih 96 komoditas yang terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 non makanan dalam penghitungan PPP.



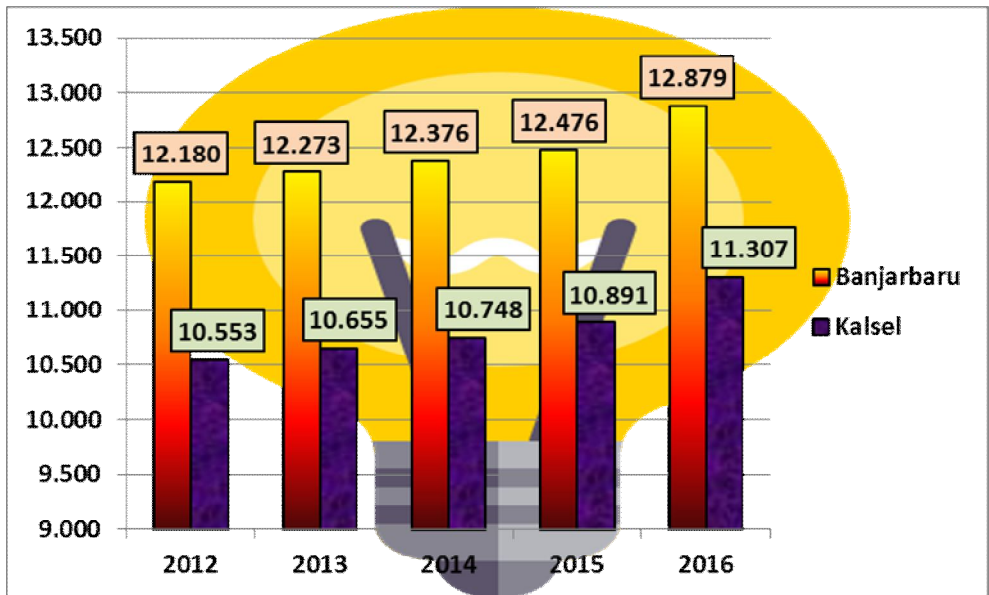


Pada grafik 10.5. komponen PPP (standar hidup layak) yang dibandingkan antara tahun 2012-2016, seluruhnya bernilai positif. Hal ini berarti terjadi peningkatan daya beli yang dimiliki masyarakat Kota Banjarbaru. Jika dikaitkan dengan pembangunan manusia, maka pola konsumsi ini dapat menjadi salah satu indikator kualitas penduduk. Hal ini karena pada pola konsumsi tercermin pola alokasi pendapatan kepada berbagai macam pengeluaran yang berbentuk makanan dan non makanan.

Dalam periode 2012-2016 kemampuan daya beli masyarakat menunjukkan kecendungan meningkat baik untuk Kota Banjarbaru maupun Kalimantan Selatan seperti terlihat pada grafik 7.5.. Daya beli penduduk Kota Banjarbaru yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sebesar 12.0180 juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 12.879 juta rupiah pada tahun 2016. Sementara kemampuan daya beli Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 10.553 juta rupiah dan 11.307 juta rupiah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa daya beli penduduk Kota Banjarbaru lebih tinggi dari rata-rata daya beli penduduk Kalimantan Selatan pada umumnya.



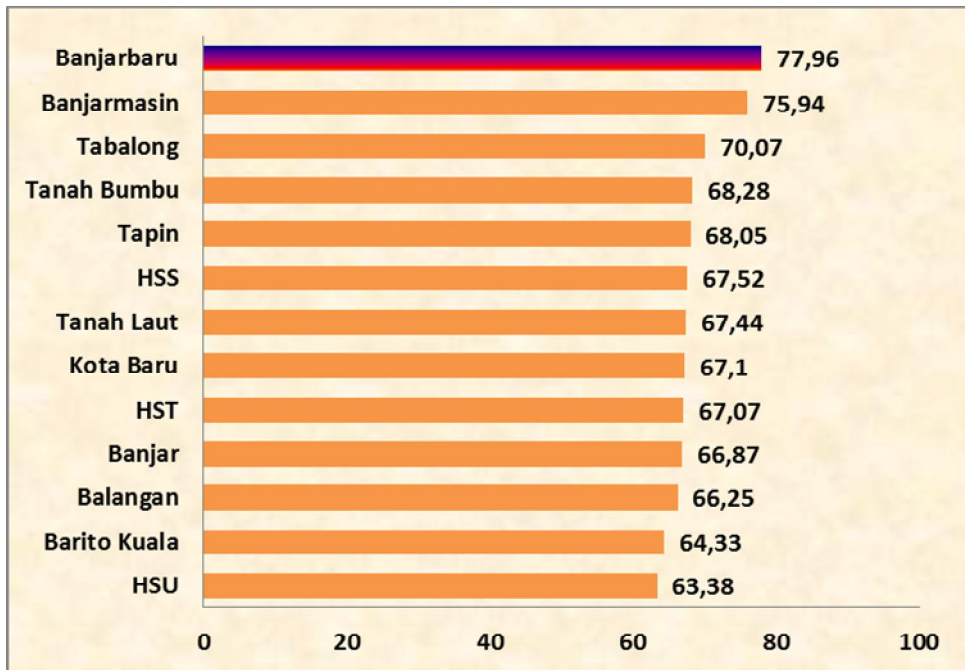
**Grafik 10.5. Perkembangan PPP Penduduk
Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012-2016 (000 Rupiah)**



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Ketiga komponen pembentuk IPM Kota Banjarbaru seperti dijelaskan tersebut di atas menunjukkan angka yang selalu berada di atas angka komponen IPM penduduk Kalimantan Selatan, hal ini karena pembentuk IPM Kalimantan Selatan adalah seluruh komponen IPM yang ada di Kabupaten/kota pendukungnya. Sementara dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan hanya ada hanya ada tiga kabuapaten/kota yang tingkatan status angka IPM-nya tergolong Tinggi yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkatan status IPM Sedang dengan nilai indeks berkisar antara 60 -70.

Grafik 10.6 Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2015



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Melihat perbandingan ini maka dapat dikatakan bahwa IPM perkotaan lebih tinggi dibanding IPM perdesaan atau Kabupaten. Hal ini dapat dipahami karena sarana maupun fasilitas yang mampu menunjang peningkatan IPM penduduk lebih lengkap di banding sarana dan fasilitas yang ada di daerah kabupaten. Sebagai contoh dari segi pendidikan, universitas Lambung Mangkurat yang merupakan universitas negeri dan ternama ada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, demikian juga dengan Rumah Sakit Umum Ulin yang memiliki fasilitas lengkap juga ada di Kota Banjarmasin, sehingga memudahkan penduduk kedua kota tersebut untuk dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Kemudahan mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan tersebutlah yang pada akhirnya mampu mengangkat derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dimana kedua komponen tersebut merupakan komponen dalam penghitungan IPM.

PENUTUP

11



LAMPIRAN

Tabel 1. PDRB Kota Banjarbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	102.892	112.849	125.432	138.736	151.436
B	Pertambangan dan Penggalian	196.009	210.286	232.812	263.723	277.488
C	Industri Pengolahan	381.010	407.460	450.367	501.660	556.098
D	Pengadaan Listrik, Gas	5.785	5.709	7.726	12.181	15.118
E	Pengadaan Air	27.270	28.945	33.742	38.308	41.405
F	Konstruksi	634.899	703.830	818.461	957.085	1.055.498
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	461.062	516.158	588.776	676.681	763.807
H	Transportasi dan Pergudangan	855.542	1.067.303	1.227.712	1.425.013	1.584.143
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121.002	130.145	151.881	169.006	185.816
J	Informasi dan Komunikasi	223.780	236.852	272.762	301.273	333.113
K	Jasa Keuangan	76.873	90.498	102.218	114.131	128.033
L	Real Estate	100.461	110.423	127.638	141.494	154.659
M,N	Jasa Perusahaan	18.043	21.263	24.540	27.791	30.990
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	566.432	646.725	731.277	866.439	906.109
P	Jasa Pendidikan	388.712	427.361	481.902	566.577	664.142
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.968	147.459	169.856	197.777	222.907
R,S,T,U	Jasa lainnya	75.816	80.460	94.861	109.856	123.636
PDRB		4.366.554	4.943.727	5.641.964	6.507.731	7.194.398

* angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel 2. PDRB Kota Banjarbaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	96.294	100.422	103.572	105.407	110.270
B	Pertambangan dan Penggalian	178.661	186.432	194.038	200.642	204.385
C	Industri Pengolahan	346.044	358.892	371.880	384.442	406.530
D	Pengadaan Listrik, Gas	6.553	6.885	8.690	11.548	11.769
E	Pengadaan Air	24.974	25.632	27.565	29.497	31.785
F	Konstruksi	592.920	636.202	685.084	735.925	784.846
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	408.845	441.376	478.112	511.611	552.036
H	Transportasi dan Pergudangan	732.338	790.041	846.168	911.688	996.623
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	111.149	116.777	123.846	131.796	141.078
J	Informasi dan Komunikasi	207.409	219.166	236.746	256.376	278.806
K	Jasa Keuangan	69.540	77.556	81.375	85.369	93.443
L	Real Estate	93.230	99.847	106.815	113.333	121.348
M,N	Jasa Perusahaan	16.619	17.847	19.100	20.090	21.796
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	497.385	526.384	557.603	606.011	618.459
P	Jasa Pendidikan	352.957	377.727	405.765	438.273	480.231
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.497	131.442	139.616	147.890	161.303
R,S,T,U	Jasa lainnya	69.202	70.740	76.852	81.484	88.092
PDRB		3.924.616	3.924.617	4.183.368	4.462.827	4.771.383

* angka sementara

** angka sangat sementara



**Tabel 3. Struktur Perekonomian Kota Banjarbaru (Persen),
Tahun 2012-2016**

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,36	2,28	2,22	2,13	2,10
B	Pertambangan dan Penggalian	4,49	4,25	4,13	4,05	3,86
C	Industri Pengolahan	8,73	8,24	7,98	7,71	7,73
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,12	0,14	0,19	0,21
E	Pengadaan Air	0,62	0,59	0,60	0,59	0,58
F	Konstruksi	14,54	14,24	14,51	14,71	14,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,56	10,44	10,44	10,40	10,62
H	Transportasi dan Pergudangan	19,59	21,59	21,76	21,90	22,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	2,63	2,69	2,60	2,58
J	Informasi dan Komunikasi	5,12	4,79	4,83	4,63	4,63
K	Jasa Keuangan	1,76	1,83	1,81	1,75	1,78
L	Real Estate	2,30	2,23	2,26	2,17	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,97	13,08	12,96	13,31	12,59
P	Jasa Pendidikan	8,90	8,64	8,54	8,71	9,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,00	2,98	3,01	3,04	3,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,74	1,63	1,68	1,69	1,72
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara



**Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru (Persen)
Tahun 2012-2016**

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,52	4,29	3,14	1,77	4,61
B	Pertambangan dan Penggalian	8,26	4,35	4,08	3,40	1,87
C	Industri Pengolahan	4,36	3,71	3,62	3,38	5,75
D	Pengadaan Listrik, Gas	9,67	5,07	26,22	32,88	1,92
E	Pengadaan Air	1,97	2,63	7,54	7,01	7,76
F	Konstruksi	6,88	7,30	7,68	7,42	6,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,48	7,96	8,32	7,01	7,90
H	Transportasi dan Pergudangan	9,02	7,88	7,10	7,74	9,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,96	5,06	6,05	6,42	7,04
J	Informasi dan Komunikasi	5,54	5,67	8,02	8,29	8,75
K	Jasa Keuangan	6,38	11,53	4,92	4,91	9,46
L	Real Estate	6,02	7,10	6,98	6,10	7,07
M,N	Jasa Perusahaan	5,37	7,39	7,02	5,18	8,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	5,83	5,93	8,68	2,05
P	Jasa Pendidikan	5,01	7,02	7,42	8,01	9,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,06	9,08	6,22	5,93	9,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,27	2,22	8,64	6,03	8,11
PDRB		6,54	6,59	6,68	6,91	6,95

* angka sementara

** angka sangat sementara



**Tabel 5. Statistik Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru,
Tahun 2013-2015**

Uraian	2012	2013	2014
(1)	(3)	(3)	(4)
TPAK (%)	61,27	60,18	64,86
Tingkat Pengangguran (%)	2,59	5,35	3,67
Bukan Angkatan Kerja (%)	38,73	39,82	35,14
Bekerja (%)	97,41	94,65	96,33
Bekerja di Sektor Primer	12,71	14,30	10,38
Bekerja di Sektor Sekunder	50,19	42,81	49,04
Bekerja di Sektor Tersier	37,10	42,89	40,59

Sumber: Data Sakernas 2013-2015 (Diolah)

*) Tahun 2016 tidak diadakan sakernas sehingga data tidak tersedia



**Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarbaru
Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPM	76,67	77,10	77,30	77,56	77,96
AHH	71,05	71,06	71,06	71,36	71,43
EYS	14,55	14,67	14,73	14,75	14,77
MYS	10,48	10,69	10,74	10,75	10,76
PENGELUARAN	12.180	12.273	12.376	12.467	12.879
PERINGKAT IPM	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

N.B :

AHH : Angka Harapan Hidup

EYS : Harapan lama sekolah (*Expected Year Schooling*)

MYS : Rata-rata lama sekolah (*Mean Year Schooling*).





DATA

Mencerdaskan Bangsa